

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA
ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS FORUM
ORGANISASI SOSIAL PEDULI SESAMA KITA)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

FITRI ANGGRAENI

NIM: 214105030035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA
ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS FORUM
ORGANISASI SOSIAL PEDULI SESAMA KITA)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 198803012018012001

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA
ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS FORUM
ORGANISASI SOSIAL PEDULI SESAMA KITA)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Selasa

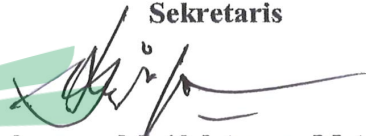
Tanggal: 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197308301999031002

Sekretaris


Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 197111142003121002

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()

2. Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.". (QS. Al-Ahzab ayat 70) ¹



¹ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah iv Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015

PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada saya, memberi saya kekuatan, dan memudahkan saya untuk menyelesaikan SKRIPSI saya. Tidak ada momen ketika Nabi Muhammad SAW tidak menerima sapaan dan doa. Sebagian besar kekuatan dan dorongan bagi penulis untuk mencapai tahap ini dalam tesis ini berasal dari orang-orang hebat yang selalu ada untuknya di setiap langkahnya. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada:

1. Keempat orang tua tercinta saya, Ibu Siti Sofiah dan Bapak (Alm. Samsito) yang selalu mendo'akan dan mendukung tanpa lelah dan mengeluh sehingga saya berhasil berjuang menyelesaikan skripsi ini. Ibu Wagiyem dan (Alm. Suhar) yang telah melahirkan saya dan selalu mendo'akan saya. Terima Semoga Allah SWT memberikan kesempatan untuk saya bisa membahagiakan kalian semua.
2. Kakak-kakak dan adek saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Mereka yang juga memberikan semangat, motivasi dan materi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Semoga semuanya selalu dalam ridho dan rahmat Allah SWT.
3. Almamater saya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semoga skripsi saya dapat memberikan manfaat dan dampak positif.
4. Untuk orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih selalu mendukung, menemani proses saya dan menjadi salah satu motivasi saya untuk

tetap semangat tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi. Semoga kita tetap bersama disituasi apapun.

5. 404 *not found*, sahabat yang merangkap menjadi keluarga tanpa ikatan darah selalu ada jika saya membutuhkan bantuan, memberikan motivasi agar tidak menyerah. Skripsi ini menjadi bukti perjalanan kita penuh warna dan makna. Semoga kita tetap bersama.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur *alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS FORUM ORGANISASI SOSIAL PEDULI SESAMA KITA) ”** dapat terlaksana dengan lancar.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kelak kita mendapatkan sayafaat beliau. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Akuntansi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis skripsi sangat menyadari, tanpa dorongan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karenanya izinkanlah kami di sini menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
7. Bapak Makhroji dan seluruh anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karenanya penulis mengharapkan baik saran maupun kritik yang sifatnya positif demi kesempurnaan skripsi ini untuk kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fitri Anggraeni, Fauzan, 2025: *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)*

Kata Kunci: *Good Governance, maqashid syariah, dan organisasi nirlaba*

Sebagai entitas yang mengelola sumber daya publik atau donasi, organisasi nirlaba memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan independensi nya dalam mencapai tujuan sosial mereka terlaksana dengan benar. serta hal tersebut sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1).Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 2).Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 3).Bagaimana penerapan prinsip independensi dalam untuk pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 4).Bagaimana penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dan pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. 2) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. 3) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. 4) Untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini ditemukan Kesimpulan bahwa: Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi telah diterapkan dengan baik, mereka telah berupaya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat juga beberapa informasi organisasi yang tidak bisa disampaikan untuk menjaga integritas organisasi hal ini wajar dilakukan demi menjaga keutuhan organisasi juga. Selain itu dalam nilai-nilai *maqashid syariah* sangat selaras dalam penerapan nya. Keterbukaan informasi yang memadai dengan adanya rapat, meskipun tidak semua bisa terbuka kepada masyarakat. Dalam menjaga laporan akuntabilitas sudah baik. Selain itu Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki kemandiria

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	32
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59

B. Lokasi Penelitian	60
C. Subyek Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data	67
G. Tahap – Tahap Penelitian	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI	70
A. Gambaran Objek Penelitian	70
B. Penyajian Data dan Analisis	80
C. Pembahasan Temuan.....	98
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran 1. Matrik Penelitian	
Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5. Pernyataan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 9. Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 10. Biodata	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita ...	84
Table 4.2 <i>Good Governance</i> ditinjau dari Perspektif <i>Maqshid Syariah</i>	113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nama Organisasi Nirlaba di Kabupaten Jember Tahun 2024..... 1

Gambar 4.1 Struktur Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang berporos pada kepentingan bagaimana organisasi tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, saling menolong antar sesama dan tanpa mencari sebuah keuntungan. Di Indonesia, keberadaan organisasi nirlaba tumbuh dengan cepat, tercermin dalam jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pasti organisasi nirlaba di Indonesia sulit ditentukan secara akurat, namun diperkirakan terdapat ribuan bahkan puluhan ribu organisasi nirlaba di seluruh Indonesia. Perkembangan ini juga diamati di tingkat lokal. Salah satunya adalah Kabupaten Jember, situs pembentukan berbagai organisasi nirlaba yang memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan masyarakat.



Gambar 1.1

Nama Organisasi Nirlaba di Kabupaten Jember Tahun 2024

NO	NAMA ORGANISASI	NO	NAMA ORGANISASI	NO	NAMA ORGANISASI
1	Desain Pengajaran Dasar	24	Desain Pengajaran Dasar	49	Magis Pengajaran Dasar
2	Desain Pengajaran Dasar	25	Magis Pengajaran Dasar	50	Magis Pengajaran Dasar
3	Desain Pengajaran Dasar	26	Magis Pengajaran Dasar	51	Magis Pengajaran Dasar
4	Desain Pengajaran Dasar	27	Magis Pengajaran Dasar	52	Magis Pengajaran Dasar
5	Desain Pengajaran Dasar	28	Magis Pengajaran Dasar	53	Magis Pengajaran Dasar
6	Desain Pengajaran Dasar	29	Magis Pengajaran Dasar	54	Magis Pengajaran Dasar
7	Desain Pengajaran Dasar	30	Magis Pengajaran Dasar	55	Magis Pengajaran Dasar
8	Desain Pengajaran Dasar	31	Magis Pengajaran Dasar	56	Magis Pengajaran Dasar
9	Desain Pengajaran Dasar	32	Magis Pengajaran Dasar	57	Magis Pengajaran Dasar
10	Desain Pengajaran Dasar	33	Magis Pengajaran Dasar	58	Magis Pengajaran Dasar
11	Desain Pengajaran Dasar	34	Magis Pengajaran Dasar	59	Magis Pengajaran Dasar
12	Desain Pengajaran Dasar	35	Magis Pengajaran Dasar	60	Magis Pengajaran Dasar
13	Desain Pengajaran Dasar	36	Magis Pengajaran Dasar	61	Magis Pengajaran Dasar
14	Desain Pengajaran Dasar	37	Magis Pengajaran Dasar	62	Magis Pengajaran Dasar
15	Desain Pengajaran Dasar	38	Magis Pengajaran Dasar	63	Magis Pengajaran Dasar
16	Desain Pengajaran Dasar	39	Magis Pengajaran Dasar	64	Magis Pengajaran Dasar
17	Desain Pengajaran Dasar	40	Magis Pengajaran Dasar	65	Magis Pengajaran Dasar
18	Desain Pengajaran Dasar	41	Magis Pengajaran Dasar	66	Magis Pengajaran Dasar
19	Desain Pengajaran Dasar	42	Magis Pengajaran Dasar	67	Magis Pengajaran Dasar
20	Desain Pengajaran Dasar	43	Magis Pengajaran Dasar	68	Magis Pengajaran Dasar
21	Desain Pengajaran Dasar	44	Magis Pengajaran Dasar	69	Magis Pengajaran Dasar
22	Desain Pengajaran Dasar	45	Magis Pengajaran Dasar	70	Magis Pengajaran Dasar
23	Desain Pengajaran Dasar	46	Magis Pengajaran Dasar	71	Magis Pengajaran Dasar
24	Desain Pengajaran Dasar	47	Magis Pengajaran Dasar	72	Magis Pengajaran Dasar
25	Desain Pengajaran Dasar	48	Magis Pengajaran Dasar	73	Magis Pengajaran Dasar
26	Desain Pengajaran Dasar	49	Magis Pengajaran Dasar	74	Magis Pengajaran Dasar
27	Desain Pengajaran Dasar	50	Magis Pengajaran Dasar	75	Magis Pengajaran Dasar
28	Desain Pengajaran Dasar	51	Magis Pengajaran Dasar	76	Magis Pengajaran Dasar
29	Desain Pengajaran Dasar	52	Magis Pengajaran Dasar	77	Magis Pengajaran Dasar
30	Desain Pengajaran Dasar	53	Magis Pengajaran Dasar	78	Magis Pengajaran Dasar
31	Desain Pengajaran Dasar	54	Magis Pengajaran Dasar	79	Magis Pengajaran Dasar
32	Desain Pengajaran Dasar	55	Magis Pengajaran Dasar	80	Magis Pengajaran Dasar
33	Desain Pengajaran Dasar	56	Magis Pengajaran Dasar	81	Magis Pengajaran Dasar
34	Desain Pengajaran Dasar	57	Magis Pengajaran Dasar	82	Magis Pengajaran Dasar
35	Desain Pengajaran Dasar	58	Magis Pengajaran Dasar	83	Magis Pengajaran Dasar
36	Desain Pengajaran Dasar	59	Magis Pengajaran Dasar	84	Magis Pengajaran Dasar
37	Desain Pengajaran Dasar	60	Magis Pengajaran Dasar	85	Magis Pengajaran Dasar
38	Desain Pengajaran Dasar	61	Magis Pengajaran Dasar	86	Magis Pengajaran Dasar
39	Desain Pengajaran Dasar	62	Magis Pengajaran Dasar	87	Magis Pengajaran Dasar
40	Desain Pengajaran Dasar	63	Magis Pengajaran Dasar	88	Magis Pengajaran Dasar
41	Desain Pengajaran Dasar	64	Magis Pengajaran Dasar	89	Magis Pengajaran Dasar
42	Desain Pengajaran Dasar	65	Magis Pengajaran Dasar	90	Magis Pengajaran Dasar
43	Desain Pengajaran Dasar	66	Magis Pengajaran Dasar	91	Magis Pengajaran Dasar
44	Desain Pengajaran Dasar	67	Magis Pengajaran Dasar	92	Magis Pengajaran Dasar
45	Desain Pengajaran Dasar	68	Magis Pengajaran Dasar	93	Magis Pengajaran Dasar
46	Desain Pengajaran Dasar	69	Magis Pengajaran Dasar	94	Magis Pengajaran Dasar
47	Desain Pengajaran Dasar	70	Magis Pengajaran Dasar	95	Magis Pengajaran Dasar
48	Desain Pengajaran Dasar	71	Magis Pengajaran Dasar	96	Magis Pengajaran Dasar
49	Desain Pengajaran Dasar	72	Magis Pengajaran Dasar	97	Magis Pengajaran Dasar
50	Desain Pengajaran Dasar	73	Magis Pengajaran Dasar	98	Magis Pengajaran Dasar
51	Desain Pengajaran Dasar	74	Magis Pengajaran Dasar	99	Magis Pengajaran Dasar
52	Desain Pengajaran Dasar	75	Magis Pengajaran Dasar	100	Magis Pengajaran Dasar
53	Desain Pengajaran Dasar	76	Magis Pengajaran Dasar		
54	Desain Pengajaran Dasar	77	Magis Pengajaran Dasar		
55	Desain Pengajaran Dasar	78	Magis Pengajaran Dasar		
56	Desain Pengajaran Dasar	79	Magis Pengajaran Dasar		
57	Desain Pengajaran Dasar	80	Magis Pengajaran Dasar		
58	Desain Pengajaran Dasar	81	Magis Pengajaran Dasar		
59	Desain Pengajaran Dasar	82	Magis Pengajaran Dasar		
60	Desain Pengajaran Dasar	83	Magis Pengajaran Dasar		
61	Desain Pengajaran Dasar	84	Magis Pengajaran Dasar		
62	Desain Pengajaran Dasar	85	Magis Pengajaran Dasar		
63	Desain Pengajaran Dasar	86	Magis Pengajaran Dasar		
64	Desain Pengajaran Dasar	87	Magis Pengajaran Dasar		
65	Desain Pengajaran Dasar	88	Magis Pengajaran Dasar		
66	Desain Pengajaran Dasar	89	Magis Pengajaran Dasar		
67	Desain Pengajaran Dasar	90	Magis Pengajaran Dasar		
68	Desain Pengajaran Dasar	91	Magis Pengajaran Dasar		
69	Desain Pengajaran Dasar	92	Magis Pengajaran Dasar		
70	Desain Pengajaran Dasar	93	Magis Pengajaran Dasar		
71	Desain Pengajaran Dasar	94	Magis Pengajaran Dasar		
72	Desain Pengajaran Dasar	95	Magis Pengajaran Dasar		
73	Desain Pengajaran Dasar	96	Magis Pengajaran Dasar		
74	Desain Pengajaran Dasar	97	Magis Pengajaran Dasar		
75	Desain Pengajaran Dasar	98	Magis Pengajaran Dasar		
76	Desain Pengajaran Dasar	99	Magis Pengajaran Dasar		
77	Desain Pengajaran Dasar	100	Magis Pengajaran Dasar		

75	Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Dadi Anak (KODAK)	101	Relawan BAKESBANGPOL
76	KPD (Kadep) Bait Indonesia (KBI) Jember	102	Relawan BAKESBANGPOL
77	Relawan Bait Indonesia (KBI) Jember	103	Relawan BAKESBANGPOL
78	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	104	Relawan BAKESBANGPOL
79	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	105	Relawan BAKESBANGPOL
80	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	106	Relawan BAKESBANGPOL
81	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	107	Relawan BAKESBANGPOL
82	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	108	Relawan BAKESBANGPOL
83	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	109	Relawan BAKESBANGPOL
84	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	110	Relawan BAKESBANGPOL
85	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	111	Relawan BAKESBANGPOL
86	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	112	Relawan BAKESBANGPOL
87	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	113	Relawan BAKESBANGPOL
88	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	114	Relawan BAKESBANGPOL
89	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	115	Relawan BAKESBANGPOL
90	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	116	Relawan BAKESBANGPOL
91	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	117	Relawan BAKESBANGPOL
92	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	118	Relawan BAKESBANGPOL
93	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	119	Relawan BAKESBANGPOL
94	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	120	Relawan BAKESBANGPOL
95	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	121	Relawan BAKESBANGPOL
96	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	122	Relawan BAKESBANGPOL
97	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	123	Relawan BAKESBANGPOL
98	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	124	Relawan BAKESBANGPOL
99	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	125	Relawan BAKESBANGPOL
100	Desan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Keluarga Putusawakan Bait Merah (PKBM)	126	Relawan BAKESBANGPOL

Sumber: bakesbangpol 2024

Data diatas sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Sosial wajib mendaftarkan diri dan melaporkan keberadaan serta kegiatannya ke instansi yang berwenang, salah satunya BAKESBANGPOL. Menurut BAKESBANGPOL atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember ada sekitar 135 organisasi nirlaba yang mendaftarkan organisasi nya secara administrasi.² Sebagai entitas yang mengelola sumber daya publik atau donasi, organisasi nirlaba memerlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk memastikan beberapa prinsip utama yakni akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan partisipasi dalam mencapai tujuan sosial mereka terlaksana dengan benar. Dengan begitu dalam pelaporan organisasi harus dikelola secara terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan.

Istilah "Tata Kelola yang Baik atau *Good Governance*" mengacu pada seperangkat konsep yang digunakan untuk menggambarkan kepemimpinan suatu organisasi. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik atau

² Observasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, 30 April 2025

Good Governance akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Menerapkan prinsip *Good Governance* dalam organisasi nirlaba mampu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan operasional dalam menjalankan roda organisasi. Tata kelola yang baik memerlukan perubahan paradigma pemikiran dan perilaku seluruh elemen sektor publik, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif.³ Hal ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, mendukung keutamaan hukum di bidang keuangan, dan meningkatkan kinerja organisasi dalam hal tata kelola organisasi. Sebuah tata kelola yang baik mampu melibatkan bagaimana suatu organisasi berfungsi dan sistem serta struktur yang digunakannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya⁴. Dalam hal ini *Good Governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan berkelanjutan.⁵

Di sisi lain tata kelola dalam konteks *syariah* merupakan salah satu pokok dalam prinsip ketauhidan. Berdasarkan konsep ini, seseorang harus mematuhi persyaratan Islam dalam setiap aspek kehidupannya termasuk kegiatan agama, politik, sosial, dan ekonomi untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan SWT. Secara umum, muslim percaya bahwa mereka bukan hanya bertanggung jawab pada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah

³ Achmad Zuhri Ramadhan dan Diah Hari Suryaningrum, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba," *Public Management and Accounting Review* 1, no.1 (Januari 2020): 2-5, <https://doi.org/10.61656/pmar.v1i1.18>

⁴ Wildan Khisbullah Suhma dkk., "Change management towards good university governance in Indonesia: study at Islamic religious universities based on BLU mandate," *Cogent Social Sciences* 10, no.1 (Maret 2024): 4-5, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2333081>

⁵ Nur Ika Mauliyah, Erna Puspitasari, dan Anam Miftakhul Huda, "Mewujudkan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian & Pemikiran Ekonomi* 7, no.1 (Desember, 20):18, <https://core.ac.uk/download/pdf/235209036.pdf>

sebagai pemegang otoritas tertinggi.⁶ Secara bahasa, *maqashid* adalah *jama' taksir* dari *isim mufrad maqshud* yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan *maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan *syariah*.

Seperti yang telah di uraikan di atas bahwasannya organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan namun untuk saling membantu antar sesama. Seperti hal nya sebuah organisasi yang berada di Desa Keting, yakni bernama Peduli Sesama Kita atau bisa disebut Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita atau biasanya warga Desa Keting menyebutnya sebagai PSK. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita merupakan organisasi sosial dalam kata lain masih dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi ini berorientasi pada sosial, maksudnya adalah Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tidak menarik keuntungan atau *profit*, namun lebih cenderung bermanfaat maslahatan untuk bersama, tidak untuk kepentingan pribadi. Awal mula terbentuknya Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita dulu hanya bernama Rumah Peduli Sesama Kita atau Rumah PSK yang didirikan oleh 7 warga Desa Keting yang memiliki tujuan bersama yakni ingin memiliki sebuah organisasi yang mampu merangkul semua aspek di Desa Keting. Organisasi ini berdiri selama 5 tahun lamanya, dalam waktu yang cukup

⁶ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al - Falah Surabaya," *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (September 2019): 2-4, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.

lama tersebut terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan juga ada yang memang merupakan kegiatan rutin dari organisasi tersebut. Kegiatan tersebut meliputi, senam kesehatan untuk para lansia yang diadakan tepat hari minggu pagi, *Little Star* sebagai wadah belajar para anak-anak belajar bahasa inggris bersama yang diadakan setiap minggu, serta ada kegiatan senam *aerobic* untuk para srikandi yang diadakan di hari rabu sore dan sabtu sore. Untuk kegiatan lainnya bernama *kampoeng jadoel*, kegiatan ini diselenggarakan setiap satu tahun sekali untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. *Kampoeng Jadoel* merupakan kegiatan lomba bazar dengan konsep menjual barang-barang maupun makanan yang berkaitan dengan ciri khas jadul, pemilik yang menjual pun harus memakai baju jadul. Ada pula lomba *fashion* baju *terjadoel*, yang diikuti oleh para anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan dari sore hingga malam hari.⁷

Dalam pelaksanaan kegiatan dari rutinan hingga setiap satu tahun sekali Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki donatur tetap dan dana dari setiap anggota PSK. Dana dari donatur tidak memiliki terikataan dalam hal apapun, murni bertujuan untuk membangun keberlanjutan kegiatan yang ada di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Meskipun sudah bertahun – tahun berdiri ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan dana-dana tersebut, bisa dilihat banyak masyarakat Desa Keting yang belum mengetahui darimana Forum

⁷ Observasi di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, Jember 12 September 2024

Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita melakukan kegiatan, sebab masyarakat Desa Keting dan juga para kepala dusun yang berada di Desa Keting pun tidak ada yang mengetahui asal mula dana kegiatan itu seperti apa. Terkadang juga antar sesama anggota tidak mengetahui bagaimana dana dari donatur tersebut bisa tercukupi atau tidak.⁸ Dalam permasalahan ini menjadi sebuah teka-teki yang perlu dipecahkan secara menyeluruh. Tidak adanya penerapan tata kelola dalam organisasi inilah yang membuat beberapa opini muncul sebagai awal mula masalah yang terjadi.

Dalam wawancara dengan Kepala Dusun Krajan Desa Keting mereka semua mengatakan bahwasannya dari terbentuknya Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, telah banyak membantu masyarakat dan juga pemerintah Desa Keting. Mereka semua percaya setiap Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengadakan sebuah kegiatan sudah pasti ada donatur yang memberikan suntikan dana kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar.⁹ Dana dari donatur inilah yang masih simpang siur. Pelaporan keuangan dari donatur tidak ada yang mengetahui, hanya ketua saja dan beberapa pengurus inti yang mengetahuinya.

Forum Organisasi Peduli Sesama Kita memiliki ciri khas tersendiri. Seperti, Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita ini tidak menerapkan pembuat laporan dana kas keluar atau kas masuk, hanya dana akan diberikan oleh para anggota ketika ada kegiatan saja itupun tidak terdapat nominal nya

⁸ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 September 2024

⁹ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember 18 September 2024

berapa, hanya memberikan dengan seikhlasnya. Dalam Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita pula tidak terdapat saldo di setiap ada pemberian dana dari donatur tetap. Hal inilah yang menjadikan Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tidak mampu dalam pengelolaan dana, sehingga sering terjadi masalah pelaporan pertanggung jawaban dana.¹⁰ Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan tata kelola yang baik dan optimalisasi *Good Governance*. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *Good Governance* adalah mendesain dan mengimplementasikan kedalam organisasi.¹¹

Selain itu, Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita Desa Keting masih belum memahami bahwasanya dalam pengelolaan sebuah organisasi memerlukan tata kelola yang baik dan teratur. Dengan menerapkannya *Good Governance* atau tata kelola, organisasi tersebut mampu melihat bagaimana kondisi pengelolaan dari segi manapun, termasuk dapat mengontrol pengelolaan laporan keuangan yang ada pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita.¹² Selain itu dengan adanya penerapan tata kelola yang baik diperlukan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat.¹³ Seperti yang dikatakan bahwasannya prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat 6 yaitu transparansi, akuntabilitas, resposibilitas,

¹⁰ Ali, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 September 2024

¹¹ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance di Jember," *Journal of Social and Islamic Culture* 22, no. 2 (April 2014):210 212, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>

¹² Observasi di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, Jember 12 September 2024

¹³ Nadia Azalia Putri dkk., "Do Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, and Good Corporate Governance Affect Indonesia's Mining Companies Value?," *Journal Accounting and Finance Review (AFR)* 2, no. 2 (April 2017): 58, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3000162

independensi, keadilan, dan partisipasi. Prinsip-prinsip itu yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan tata kelola dalam organisasi nirlaba pada umumnya. Akan tetapi dalam keadaan pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita hanya menerapkan beberapa prinsip dalam menjalankan program serta kegiatan. Prinsip tersebut mencakup seperti akuntabilitas, transparansi, dan independensi.

Untuk dapat melakukan kegiatan dan membangun keberlanjutan organisasi dibutuhkan suatu tata kelola. Tata kelola yang baik menyediakan kerangka kerja di mana orang dapat bertindak dengan tingkat kepastian. Kebalikannya adalah bahwa tata kelola yang buruk ialah kerangka kerja yang memicu tidak adanya rasa saling mengasihi dan membantu menciptakan kondisi yang mendorong konflik dan kehancuran hubungan orang-orang yang ada dalam organisasi. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan suatu keharusan bagi suatu lembaga, termasuk lembaga perbankan syariah karena adanya akuntabilitas publik terkait dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan sepenuhnya sesuai hukum positif.¹⁴

Penelitian-penelitian mengenai implementasi *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi nirlaba pernah dilakukan oleh Marlia Asmarani dan Rohmawati, yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian nya bahwa akuntabilitas telah dijalankan sebagaimana

¹⁴ Nur Alifah Fajariyah & Khusnul Khotimah, "Sharia Risk, The Indicator of Sharia Governance on Islamic Banks," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 1, no. 1 (Juni 2018): 70-71, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/34>

mestinya. Analisis *Shariah Enterprise Theory* (SET) pada akuntabilitas YDSF memiliki pemahaman tentang aspek *hablumminallah* atau akuntabilitas vertikal yang dapat dilihat dari dimensi spiritual. Pada aspek *hablumminannas* atau akuntabilitas horizontal dapat dilihat dari dua dimensi yaitu, akuntabilitas program, dan keuangan. Penelitian ini juga menggambarkan praktik dan bentuk akuntabilitas sesuai dengan standar regulasi yang berlaku sesuai dengan *maqashid* syariah yang dilihat dari regulasi syariah dan hukum positif yaitu al-Qur'an, *As-Sunnah*, PSAK 109 dan peraturan.¹⁵ Dari penelitian Marlia Asmarani dan Rohmawati hanya fokus pada prinsip akuntabilitas sedangkan dalam prinsip *Good Governance* ada beberapa prinsip yang belum di cantumkan oleh penelitian ini. Padahal jika diterapkan akan keseluruhan prinsip-prinsip *Good Governance* akan lebih baik lagi untuk berjalannya sebuah organisasi.

Dari penjelasan di atas peneliti juga melihat bahwasanya jika Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, akan lebih baik dan tertata jika diterapkan nya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid* syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)”.

¹⁵ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, “Akuntabilitas Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al -Falah Surabaya,” 7-8,

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam *syariah* adalah bertujuan demi terciptanya *maslahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Untuk tercapainya peranan organisasi nirlaba yang sejalan dengan *maqashid syariah*, diperlukanlah tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan umat di masa sekarang. Maka hal ini dapat menggunakan konsep tata kelola yang disebutlah *Good Governance* yang kemudian dapat diimplementasikan kedalam pengelolaan laporan keuangan. Konsep *maqashid* dihadirkan untuk melihat apakah realitas dalam organisasi termasuk tata kelola dan konteks sosial sudah terjalin secara *maqashid*. Artinya, perspektif *maqashid*, tidak hanya melihat prioritas tata kelola yang lebih dahulu diperbaiki, namun mengembangkan dan juga membangun.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari hasil pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan di teliti sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan pinrisp transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
2. Bagaimana penerapan pinrisp akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?

3. Bagaimana penerapan prinsip independensi dalam untuk pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
4. Bagaimana penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dan pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
3. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
4. Untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, dengan menerapkan prinsip tersebut Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita lebih mengembangkan tata kelola yang teratur dan handal. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menambah wawasan pada bidang Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak kepentingan, seperti:

a. Bagi Peneliti

Karya penelitian ini mampu memperluas serta menambah wawasan peneliti terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi nirlaba atau dunia bisnis.

b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan keyakinan peneliti sangatlah berharap besar dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan literatur bagi akademik serta referensi bagi mahasiswa lain yang ingin membuat penelitian lebih lanjut terkait prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi nirlaba.

c. Bagi Pihak Forum Organisasi Peduli Sesama Kita

Dengan adanya penelitian ini untuk menambah wawasan pemilik organisasi serta mampu diajukan sebagai sumbangan masukan sebuah pembaruan.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau sumber informasi dalam menambah wawasan serta gambaran terkait penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi nirlaba.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam penelitian didalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis.¹⁶

Beberapa istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud diatas sebagai berikut.

1. *Good Governance*

Good Governance adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan atau organisasi yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁷ *Good Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah saja, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat

¹⁶Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

¹⁷ Suci Meinanrti, Sahade dan Masnawaty S, “Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar,” *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (Desember 2024): 338-348, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.135>.

madani dan pihak swasta. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk keperluan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran satu individu atau kelompok tertentu saja.

Good Governance menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Hal yang cukup penting dalam memahami *Good Governance* atau tata kelola yang baik yaitu dengan memahami prinsip-prinsip *Good Governance* itu sendiri. Dengan melihat dan mempelajarinya, maka kita bisa menilai kinerja suatu pemerintahan atau organisasi berdasarkan tolak ukur yang ada dalam prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan begitu penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan atau organisasi bisa dinilai berdasarkan prinsip-prinsip dan karakteristik tersebut. Dengan diimplementasikannya karakteristik atau prinsip-prinsip *Good Governance*, maka fungsinya akan banyak manfaat dan tujuan yang bisa dicapai diantaranya seperti meminimalkan terjadinya korupsi, pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan, dan pandangan

dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.¹⁸

2. *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid* berasal dari bentuk jamak dari kata *maqshid* yang berarti tempat tujuan. Kata *Maqashid* berasal dari kata *qashd*, (*qashada*, *yaqshidu*, *qashd*, *fahuwaqaashid*). Ibn Manzūr memaknai kata *qashd* dengan arti; tetap pada jalan (*istiqaamat al-thariiq*). Selain makna di atas, kata *qashd* juga berarti adil (*'adl*), atau sikap pertengahan (*i'tidaal*), yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas (*ifraat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israaf*) dan kikir (*taqtiir*).¹⁹ Tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dengan mengimplementasikan *akhlaqul karimah* bertujuan agar terciptanya *rahmatan lil 'alamin* dengan tercapainya tujuan syariah (*maqashid syariah*).

3. Organisasi Nirlaba

Dalam ISAK 35 menjelaskan bahwa organisasi nirlaba merupakan entitas yang berorientasi untuk tidak memperoleh laba non laba (nirlaba) yaitu entitas yang ruang lingkupnya fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak bertujuan mencari laba organisasi nirlaba dapat

¹⁸ Anita, *Prinsip-Prinsip Good Governance dan Penjelasannya Lengkap* (Jakarta: Artikel Ilmu Pengetahuan Terlengkap, 2017), 5-6, <https://www.daftarinformasi.com/prinsip-good-governance/>.

¹⁹ Muhammad Iqbal, "Good Governance Perspektif *Maqashid asy – Syariah* Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (Agustus 2018): 13-15, <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/1195>.

dikelompokkan dalam dua kelompok utama. *Kelompok pertama*, adalah organisasi nirlaba yang membutuhkan pengeluaran modal pendahuluan dan kemudian membiayai sendiri. Kelompok ini misalnya diwakili oleh perguruan tinggi swasta, pendapatan dari pembayaran dapat melebihi biaya untuk menyediakan pelayanan yang diberikan, namun kelebihan itu dipakai untuk melanjutkan tujuan perguruan tinggi. *Kelompok kedua* yaitu organisasi nirlaba yang didukung oleh sumbangan tetap atau bantuan dana, tidak dengan menjual suatu pelayanan. Kelompok ini meliputi pemerintahan pusat dan daerah, ditopang oleh pajak, suku bunga, pengumpulan dana, kewajiban lain dan sebagainya yang sebagian besar memaksa. Namun demikian termasuk dalam kelompok ini yang perolehan dana nya secara tidak memaksa dalam arti suka rela yang berasal dari sumbangan masyarakat misalnya badan sosial, panti asuhan dan sejenisnya.²⁰ Dalam hal ini Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita termasuk dalam kategori kelompok kedua yang mana dalam beberapa tahun berdiri organisasi ini menerima dana dari donatur tetap serta dana dari beberapa masyarakat yang suka rela tanpa memaksakan kehendak masing-masing. Tujuan dari organisasi nirlaba pada umumnya yakni bukan untuk mencari keuntungan laba tetapi untuk mensejahterahkan masyarakat dan manfaat sosial di lingkungan sekitar.

²⁰ Bambang Suryono, "Organisasi Nirlaba: Karakteristik Dan Pelaporan Keuangan Organisasi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 2 (November 2016): 17-19, [10.24034/j25485024.v1999.v3.i2.1883](https://doi.org/10.24034/j25485024.v1999.v3.i2.1883).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu bagian yang menjelaskan urutan langkah-langkah pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Agar materi yang akan disampaikan lebih mudah dipahami, penelitian menyediakan penjabaran khusus untuk setiap bab sebagai berikut:

BAB I Berupa kajian pendahuluan yang membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berupa kajian pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kajian teori

BAB III Berupa metode penelitian yang membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Berupa penyajian data dan analisis. Bab ini terdiri dari berbagai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dalam penelitian.

BAB V Berupa penutup yang mencakup tentang kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti telah melakukan pencarian dan mencantumkan hasil karya pendahulu yang berkaitan serta memiliki esensi penelitian ini. Penelusuran yang dilakukan penelitian sebagai berikut ini:

1. Marlia Asmarani, Rohmawati Kusumaningtias, Jurnal dengan judul, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya" Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dana Sosial Al Falah Yayasan (YDSF). Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan tidak langsung dengan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yaitu LAZ YDSF.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah dijalankan sebagaimana mestinya. Analisis *Shariah Enterprise Theory* (SET) pada akuntabilitas YDSF memiliki pemahaman tentang aspek *hablumminallah* atau akuntabilitas vertikal yang dapat dilihat dari dimensi spiritual. Pada aspek *hablumminannas* atau akuntabilitas horizontal dapat dilihat dari dua dimensi yaitu, akuntabilitas program, dan keuangan. Penelitian ini juga

menggambarkan praktik dan bentuk akuntabilitas sesuai dengan standar regulasi yang berlaku sesuai dengan *maqashid syariah* yang dilihat dari regulasi *syariah* dan hukum positif yaitu al-Qur'an, *As-sunnah*, PSAK 109 dan peraturan.²¹

Persamaan dari kedua penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan teknik wawancara dan menggunakan perspektif *maqashid syariah* sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis mentitik fokuskan pada beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yang relevan padan organisasi nirlaba, sedangkan untuk penelitian Marlia Asmarani, Rohmawati Kusumaningtias memfokuskan pada akuntabilitas saja pada lembaga amil zakat.

2. Cicilia Citra Maradesa dan James D. D Massie, Jurnal dengan judul, "Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Organisasi Nirlaba di Unit Transfusi Darah" Mahasiswa Sam Ratulangi Manado,

Tujuan penelitian ini adalah untuk memiliki tanggung jawab dan keadilan menjaga hubungan yang baik dan membangun kepercayaan yang baik dari masyarakat, PMI membutuhkan penerapan GCG dengan prinsip-prinsipnya (TARIF). Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

²¹ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya," 24-23.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMI di UTD SULUT sudah menerapkan GCG dengan prinsip-prinsipnya tetapi masih mempunyai masalah mengenai stock darah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan darah, PMI di UTD SULUT harus lebih banyak bersosialisasi, membangun komunikasi yang baik, mengundang masyarakat untuk dapat mendonorkan darah mereka.²²

Persamaan dari kedua penelitian adalah membahas prinsip *Good Governance* pada organisasi nirlaba. Sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis yaitu prinsip-prinsip *Good Governance* digunakan untuk menerapkan tata kelola organisasi nirlaba yang baik, sedangkan untuk penelitian Cicilia Citra penggunaan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk menyetok permasalahan stok darah di unit transfusi darah.

3. Achmad Zuhri Ramadhan dan Diah Hari Suryaningrum, Jurnal dengan judul, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba" Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* pada kinerja keuangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba perlu adanya tata kelola yang disusun dengan baik agar setiap tujuan organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien serta

²² Cicilia Citra Maradesa dan James D. D Massie, "Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Organisasi Nirlaba di Unit Transfusi Darah," *Jurnal EMBA* 7, no. 4 (Oktober 2019): 23-25, <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26241>.

transparansi kepada masyarakat. Kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja organisasi sesuai jenis-jenis akuntansi keuangan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FLP Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Governance* dan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 45.²³

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas tentang prinsip *Good Governance* dan juga merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini organisasi yang dijadikan sebagai objek merupakan organisasi sosial yang lebih mengedepankan kemaslahatan bersama, sedangkan penelitian terdahulu merupakan FLP Surabaya, organisasi yang bergerak dakwah dari sebuah tulisan.

4. Sulastris dan Ichwani Siti Utami, Jurnal dengan judul, “Implementasi *Good Governance* Pada Organisasi Mahasiswa”, Mahasiswa Universitas Pamulang.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketiga prinsip *Good Governance* tersebut pada organisasi

²³ Achmad Zuhri Ramadhan dan Diah Hari Suryaningrum, “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba,” *Journal Public Management and Accounting Review* 1, no. 1 (Januari 2020): 9-11, <https://doi.org/10.61656/pmar.v1i1.18>.

mahasiswa di Universitas Pamulang. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya partisipasi keaktifan pengurus organisasi mahasiswa dari beberapa program studi, transparansi dokumen dan kebijakan lainnya hanya bisa dikonsumsi atau diketahui oleh pengurus mahasiswa dan tidak dipublikasikan untuk umum karena hanya beberapa prodi yang mempublikasikan, sedangkan akuntabilitas dokumen sudah dilaksanakan dengan baik.²⁴

Persamaan penelitian ini keduanya sama-sama membahas pengimplementasian prinsip *Good Governance*, sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis adalah studi kasus, untuk penelitian Sulastri menggunakan pendekatan normatif empiris.

5. Lailatul Qomariyah dan Erna Sulistiyowati, Jurnal dengan judul, “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)” Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yayasan YPI Darussalam Cerme dengan paradigma tata kelola yang baik. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi studi literatur.

²⁴ Sulastri dan Ichwani Siti Utami, “Implementasi *Good Governance* Pada Organisasi Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (September 2020): 6-8, <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p87-96>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YPI Darussalam telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi penyajian keuangan pernyataan tidak sesuai dengan ISAK 35.²⁵

Persamaan, penelitian ini adalah membahas implementasi prinsip *Good Governance* pada salah satu kategori organisasi nirlaba serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat perbedaan penelitian ini pada bagian teknik pengambilan sampel yang mana menggunakan *purposive sampling*, sedangkan penelitian Lailatul menggunakan teknik pengambilan *snowball sampling*.

6. Yusak Kharis Windarta, Jurnal dengan judul, “Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Organisasi Keagamaan GKJ Wedi” Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana.

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menjelaskan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di organisasi keagamaan secara khusus di Gereja Kristen Jawa Wedi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan GKJ Wedi menerapkan transparansi adanya sidang majelis terbuka yang dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai program, keuangan, dan hasil kegiatan. Kemudian, melalui warta gereja yang dapat memberikan akses informasi yang rinci, jelas dan tepat waktu. Selain itu, terdapat wadah

²⁵ Lailatul Qomariyah dan Erna Sulistiyowati, “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme),” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (Januari 2022): 9-12, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i1.834>.

yaitu akta sidang dan notulensi untuk dapat mengetahui kebijakan yang tertulis. Dengan demikian GKJ Wedi dapat mewujudkan keterbukaan informasi untuk menerapkan prinsip transparansi. Prinsip akuntabilitas diterapkan oleh GKJ Wedi dengan membuat laporan pelaksanaan kerja dan anggaran serta audit oleh tim pemeriksa keuangan, tetapi dalam membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan belum mengacu pada standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu ISAK 35.²⁶

Persamaan penelitian ini penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan pembahasan keduanya sama-sama terkait penerapan prinsip *Good Governance* pada organisasi nirlaba. Terdapat perbedaan dari penelitian penulis yaitu pada objek yang diteliti yakni merupakan organisasi sosial yang berada pada salah satu desa di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian Yusak Kharis memakai objek salah satu organisasi nirlaba yang bergerak pada keagamaan.

7. Suci Meinarti, Sahade, Masnawaty S, Jurnal dengan judul, “Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar” Mahasiswa Universitas Negeri Makasar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan yang diterapkan di Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya

²⁶ Yusak Kharis Windarta, “Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Organisasi Keagamaan Gkj Wedi,” *Journal Economic and Business* 1, no. 1 (Juli 2023): 16-19, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30853>.

Makassar. Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum sepenuhnya memenuhi indikator yang diterapkan untuk mengatur prinsip-prinsip *Good Governance* seperti regulasi yang mengatur bentuk transparansi di Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya belum tersedia, Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar dalam membuat laporan keuangan belum mengikuti ISAK 35 yang mengatur tentang laporan keuangan organisasi nirlaba.²⁷

Persamaan dari penelitian ini membahas prinsip-prinsip *Good Governance* pada salah satu yang termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini terjadi suatu pelaporan keuangan di dalam organisasi namun hanya ala kadarnya, sedangkan untuk penelitian Suci fokus penelitian terhadap pelaporan keuangan yang sudah tercatat.

²⁷ Suci Meinarti, Sahade dan Masnawaty S, “Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2, no. 4 (Desember 2024): 12-14, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.135>.

8. Nurohimah, Aurya Dewitri Angel Siboro dan Ratih Kusumastuti, Jurnal dengan judul, “Dampak Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Laporan Keuangan Masjid (Analisis Studi Kasus Dikota Jambi)” Mahasiswa Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* yang terjadi di laporan keuangan pada masjid yang ada di Kota Jambi. Sebab pelaporan keuangan yang ada pada masjid hanya menggunakan pembukuan secara manual pada buku mutasi kas masjid, untuk memastikan bahwasanya laporan keuangan masjid berjalan dengan baik, transparan dibutuhkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk mengelola laporan keuangan yang ada pada masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, termasuk observasi secara langsung, wawancara dengan pengurus, dan analisis dokumen terkait.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi pengelolaan keuangan masjid sudah dilakukan dengan cukup baik, laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar PSAK No. 45. Oleh karena itu, penerapan GCG di masjid dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.²⁸

²⁸Nurohimah, Aurya Dewitri Angel Siboro dan Ratih Kusumastuti, “Dampak Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Laporan Keuangan Masjid (Analisis Studi Kasus Dikota Jambi),” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (Januari 2024): 14-17, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.489>.

Persamaannya, peneliti penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data melalui observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang menitikberatkan pada penerapan secara langsung prinsip *Good Governance* pada organisasi nirlaba, sementara penelitian Nurohimmah mempusatkan dampak yang terjadi pada laporan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

9. Hendrayuda Suwarno, Jurnal dengan judul, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Pondok Pesantren”. Mahasiswa Muhammadiyah Boarding School (MBS) *Islamic Boarding School*, Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan data lapangan dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan situasi lapangan serta menghubungkan sebab dan akibat dari peristiwa yang terjadi selama penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran realitas secara keseluruhan mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, survei, kuisioner, wawancara dan *studi literatur*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip GCG secara keseluruhan adalah Baik, dengan skor total 419,3, jadi skor penilaian $(419.3/5) = 83,86$.²⁹

Persamaanya penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan objek yang sama-sama termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada perspektif yang di pakai yaitu menggunakan perspektif *maqashid syariah*, sedangkan untuk penelitian Hendrayuda Suwarno titik fokus nya hanya pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang tidak memakai perspektif apapun.

10. Farryl Febian Aroran, Mutya Paramita Pratita dan Marjam Desma Rahadhini, Jurnal dengan judul "*The Influence of Good Corporate Governance (GCG) Implementation on the Youth Information and Counseling Centers (PIK-Remaja) Effectiveness in Surakarta*", Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi.

Tujuan penelitian ini untuk memahami lebih dalam hubungan antara aspek GCG dan efektivitas PIK-Remaja organisasi. Penelitian dilakukan di beberapa daerah di Surakarta, antara lain Serengan, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, dan Laweyan. Metode penelitian yang ini menggunakan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui survei atau kuesioner.

²⁹ Hendrayuda Suwarno, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Pondok Pesantren" *Qualitative Research of Business and Social Science* 1, no. 2 (Juli 2024): 10-13, <https://doi.org/10.31316/qrobss.v1i2.6687>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Temuan-temuan ini menggaris bawahi pentingnya menanamkan protokol tata kelola yang kuat dalam kerangka operasional PIK-Remaja untuk meningkatkan kemanjurannya dalam memenuhi kebutuhan demografi pemuda.³⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Governance*. Sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis adalah metode dalam pengambilan penelitian yaitu kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk penelitian Farly Febian menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik kuisioner.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya,	Persamaannya metode penelitian yang diambil adalah kualitatif dan juga termasuk dalam perspektif syariah	Perbedaan penelitian ini yakni fokus penelitian yang diambil hamper keseluruhan prinsip <i>Good Governance</i> , sedangkan untuk penelitian terdahulu hanya terfokus pada akuntabilitas saja

³⁰ Farly Febian Aroran, Mutya Paramita Pratita dan Marjam Desma Rahadhini, "The Influence of Good Corporate Governance (GCG) Implementation on the Youth Information and Counseling Centers (PIK-Remaja) Effectiveness in Surakarta," *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 7, no. 1 (Mei 2024): 19-23, <https://www.ejournal.aibpmjournals.com/index.php/JICP>.

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Marlia Asmarani, Rohmawati Kusumaningtias, 2019		
2	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Organisasi Nirlaba Di Unit Transfusi Darah, Cicilia Citra Maradesa, James D. D Massie, 2019	Persamaannya adalah membahas organisasi nirlaba dan juga merupakan penelitian studi kasus	Perbedaan penelitian ini prinsip <i>Good Governance</i> yang dipakai untuk menerapkan bagaimana tata kelola di dalam organisasi nirlaba, sedangkan penelitian terdahulu prinsip <i>good governance</i> digunakan untuk menyetok permasalahan stok darah di unit transfusi darah.
4	Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Organisasi Mahasiswa, Sulastri, Ichwani Siti Utami, 2020	Persamaannya adalah membahas bagaimana pengimplemntasian prinsip <i>Good Governance</i>	Perbedaan penelitian ini objek yang diteliti merupakan organisasi nirlaba hingga pendekatan penelitian dengan menggunakan studi kasus, sedangkan untuk penelitian terdahulu objek nya memakai organisasi mahasiswa dengan pendekatan penelitian normatif empiris
5	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme), Lailatul Qomariyah, Erna Sulistiyowati, 2022	1. Persamaannya adalah pengimplmentasi prinsip <i>Good Governance</i> 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini yaitu teknik penelitian <i>purposive sampling</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan <i>snowball sampling</i>

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Organisasi Keagamaan GKJ Wedi, Yusak Kharis Windarta, 2023	1. Persamaan nya adalah pengimplemntasia n prinsip <i>Good Governace</i> pada organisasi nirlaba 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini objek yang diteliti merupakan organisasi sosial, Sedangkan untuk penelitian terdahulu objeknya memakai salah satu contoh dari organisasi nirlaba yakni organisasi keagamaan GWJ Wedi
7	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki, Prasetya MakassarSuci Meinarti, Sahade, Masnawaty S, 2024	1. Persamaannya adalah membahas prinsip <i>Good Governance</i> pada organisasi nirlaba 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini tidak terjadi nya suatu laporan keuangan di dalam organisasi, sedangkan untuk penelitian terdahulu fokus terhadap pelaporan keuangan nya yang sudah tercatat.
8	Dampak Implementasi <i>Good Corporate Governanve</i> Terhadap Laporan Keuangan Masjid Analisis Studi Kasus Dikota Jambi, Nurohimah, Aurya Dewitri Angel Siboro, Ratih Kusumastuti, 2024	1. Persamaannya adalah sama memakai studi kasus dalam penelitiannya 2. Metode dan teknik yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini implementasi prinsip <i>Good Governance</i> pada organisasi nirlaba, sedangkan penelitian terdahulu yang dibahas yakni dampak implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada laporan keuangan masjid.
9	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Pondok Pesantren, Hendrayuda Suwarno, 2024	1. Persamaannya adalah objek yang dipakai termasuk organisasi nirlaba 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian ini prinsip <i>Good Governance</i> dalam perspektif syariah sedangkan penelitian terdahulu yang dibahas yakni <i>Good Corporate Governance</i> pada salah satu pesantren.
10	<i>The Influence of Good Corporate Governance (GCG)</i>	Persamaannya adalah membahas	Perbedaan penelitian metode penelitian yang diambil yakni kualitatif

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Implementation On The Youth Information And Counseling Centers (PIK-Remaja) Effectiveness in Surakarta, Farryl Febian Aroran, Mutya Paramita, Marjam Desma Rahadini, 2024.</i>	terkait prinsip <i>Good Governance</i>	dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan data yang diambil melalui kuisioner

Sumber: Data kajian diolah

diatas bisa disimpulkan bahwa, ditemukannya kesamaan antara penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas terkait bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* pada organisasi nirlaba. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ini yaitu terletak pada pengambilan obajek, pembahasan, hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan, dan juga peraturan yang digunakan. Pada penelitian terdahulu masih banyak organisasi nirlaba yang belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, ada pula yang sudah namun masih kurang dalam menerapkannya. Terdapat kendala dalam penerapannya, termasuk kendala dalam internal maupun eksternal organisasi.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini peneliti telah membahas teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dengan perincian teori secara menyeluruh, peneliti mampu memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori ini mencakup:

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dikatakan baik, sebab *Good Governance* mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.³¹

Istilah *Good Governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an, terutama sering interaksi dengan negara-negara pemberi pinjaman dan hibah yang selalu menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. *Good Governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan bahkan dijadikan semacam kriteria untuk dapat memperoleh kemampuan bantuan yang optimal, dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi.³²

³¹Citrawati Fitri Kartika, Imam Hanafi dan Hermawan, *Good Environmental Governance* (Bandung: UB Press, 2012) 2-3, <https://www.perpusnas.go.id/>.

³²Moenek dan Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, September 2023), 21-23

Konsep *Good Governance* berkembang menjadi suatu paradigma yang tidak mampu untuk ditinggalkan dari adanya konsep *Governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik. *Good Governance* menyertakan peran masyarakat, yaitu turut membangun bangsa, suara, dan pendapat masyarakat, yaitu dijadikan suatu pertimbangan.

Good Governance pada organisasi nirlaba tidak hanya penting untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang, karena kepercayaan publik merupakan salah satu aset terbesar bagi organisasi yang beroperasi tanpa tujuan keuntungan. Dalam banyak literatur, *Good Governance* dipandang sebagai konsep yang berkembang dari kebutuhan untuk memperbaiki praktik-praktik tata kelola yang buruk, yang seringkali menyebabkan korupsi, ketidakefisienan, dan ketidakadilan dalam organisasi dan pemerintah.

b. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* pada organisasi nirlaba menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik dan mempertahankan kepercayaan publik. Berikut

beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yang relevan untuk organisasi nirlaba:

1) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan mereka. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi tindakan pemerintah.³³

Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.³⁴

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam hal ini, transparansi adalah

³³ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), 5-6, https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

³⁴ Dadang Suwanda dkk., *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 44, <http://eprints.ipdn.ac.id/5905/>

kata yang lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Dalam hal ini setiap institut atau organisasi dibutuhkan dan diwajibkan adanya sebuah transparansi karena untuk memberikan sebuah kejelasan laporan keuangan dan informasi lainnya untuk digunakan dalam mengambil sebuah keputusan bersama. Organisasi nirlaba harus terbuka dalam hal informasi keuangan, operasional, serta pengambilan keputusan. Informasi ini harus mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk donatur, penerima manfaat, dan masyarakat umum. Prinsip transparansi menekankan pada penerapan keterbukaan informasi, kelengkapan dan tepat waktu mengenai laporan keuangan, informasi mengenai organisasi, dan kebijakan yang ada pada organisasi.³⁵

Transparansi dalam prinsip *Good Governance* merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor *public* maupun *non public* seperti organisasi nirlaba. Dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang

³⁵ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), 10

direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran.

2) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini, peran kewajiban atau pertanggungjawaban harus bisa menggambarkan suatu kinerja perusahaan dalam mendapatkan tindakan seseorang yang mencakup kumpulan organisasi dari tiap-tiap pihak yang memiliki hak dan wewenang dalam mendapatkan hasil serta tanggung jawab tersebut.³⁶ Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³⁷ Akuntabilitas juga dikatakan sebagai syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan

³⁶ Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa, *E-JRA* Vol. 10, No. 04 (2021): 119, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10563/8353>

³⁷ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003), 3-4, https://pakajen.go.id/main/images/New_Web/4.Kesekretariatan/4.18.Pedoman_Pengelolaan_Kesekretariatan/D.PTIP/C.Pelaporan/11.SK_KaLAN_239-2003_SAKIP.pdf

nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.³⁸

Konsep ini sangat diperlukan untuk mengontrol sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi. Suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi.³⁹

Organisasi nirlaba bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini berarti mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai yang dapat ditunjukkan melalui adanya laporan mengenai aktivitas keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan sumber dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas organisasi ditekankan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus organisasi dan publik atas keuangan maupun non keuangan agar pelaksanaan dan

³⁸ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar dan Miah Said, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sulawesi Selatan: CV Berkah Utami, 2021), 16-17, https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.%20BUKU_AKUNTAB%20ILITAS%20DAN%20TRANSPARANSI%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN....pdf?sequence=1&isAllowed=y

³⁹ Eko Sudarmono dkk., *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 7-8, <https://martonomily.com/wp-content/uploads/2024/07/FullBook-Good-Corporate-Governance- web.pdf>

fungsi organisasi sebagai organisasi dapat terlaksana secara efektif, efisien dan bermanfaat. Tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dapat meningkat. Oleh karena itu, prinsip ini adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola public yang baik.⁴⁰

3) Independensi (*independence*)

Independensi atau kemandirian adalah sikap perusahaan atau organisasi yang harus secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁴¹ Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini Organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak

⁴⁰ Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, Muh Hamdi Zain., *Birokrasi Dan Publik Governance* (Yogyakarta: CV Istana Agensi, 2024), 98-99, https://digilib.uinkhas.ac.id/32145/1/BIROKRASI%20DAN%20PUBLIK%20GOVERNANCE_ISBN_OK.%20-%20EBOOK.pdf

⁴¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 7-9

lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan unique point di antara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.⁴²

4) Responsibilitas

Levine dalam Dwiyanto mengemukakan *responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dalam pemberian pelayanan memiliki berbagai ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggungjawab pegawai terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.⁴³ Organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Tingkat tanggungjawab dalam pelayanan sangat mempengaruhi penilaian kinerja dari pegawai dan kualitas pelayananyang dihasilkan. Kinerja yang baik akan menghasilkan

⁴² Eko Sudarmono dkk., *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 9-10

⁴³ Levine, *The Benefits of Corporate Social Responsibility*, (New York Law Journal, 2008), <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1139856>

pelayanan yang berkualitas sehingga dalam mengukur kinerja maka dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur.

Organisasi nirlaba membentuk sikap untuk peningkatan kinerja pada pengelolaan organisasi yang diimplementasikan melalui tidak adanya tekanan dan desakan dari pihak lain serta adanya aturan yang mendasar terkait keputusan objektif yang memedulikan hak dan tugas pekerja. Pada umumnya dalam organisasi bisnis menerapkan bagaimana langkah-langkah, kebijakan, dan sistem yang dapat mencegah tindakan mendominasi dan mencegah konflik kepentingan.

5) Kesenjangan atau Keadilan

Fairness atau keadilan adalah prinsip moral dan etika yang menekankan pada perlakuan yang setara, tidak memihak, dan proporsional kepada semua pihak yang terlibat. Fairness berarti memberikan hak sesuai dengan apa yang semestinya diterima oleh setiap individu, tanpa diskriminasi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Ada prinsip kesetaraan sudah baik dengan memberikan perlakuan yang sama atau tidak membedakan status sosial, serta suku dari masyarakat telah dilakukan oleh aparat pemerintah baik di pusat. Prinsip

kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

6) Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta hasil-hasilnya.⁴⁴

Prinsip-prinsip *Good Governance* ini dapat membantu memastikan bahwa organisasi atau pemerintahan beroperasi secara efektif, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip ini diterapkan pada skala global, nasional, dan lokal dan telah menjadi fokus utama banyak negara dalam melakukan reformasi pemerintahan dan pengembangan demokrasi. *Good Governance* juga menjadi dasar bagi banyak program dan inisiatif pembangunan internasional, serta menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.⁴⁵ Prinsip-prinsip

⁴⁴ Eko Sudarmono dkk., *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15-16

⁴⁵ Tampubolon dkk., *Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: PT Global Eksekutif, 2023), 28-29, <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/11661>.

Good Governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar.

c. Tujuan *Good Governance*

Secara sederhana *Good Governance* merujuk pada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi juga institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat meningkatkan nilai jangka panjang pemilik memaksimalkan pengembangan SDM dan lainnya. Dilihat dari berbagai forum, *Good Governance* sudah menjadi isu penting dunia. Organisasi memiliki peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial.

Dengan dibentuknya konteks *governance* maka peran yang dimiliki oleh pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan. Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi pada masa yang akan datang menurut Eddi Wibowo sebagai berikut:

- 1) Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan.
- 2) Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan.
- 3) Meningkatkan efesiensi dan resposivitas pemerintah
- 4) Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokrasi sistem
- 5) Desentralisasi sistem administrasi

- 6) Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok
- 7) Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya
- 8) Melindungi lingkungan
- 9) Mempromosikan kesejahteraan ⁴⁶

Tanpa memiliki organisasi yang efisien suatu negara akan sulit untuk menciptakan masyarakat. Untuk itulah *good governance* menjadi suatu kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi nasional.⁴⁷

2. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Pengertian mengenai *maqashid al shariah* dapat dirujuk dari buku yang berjudul *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya Abu Ishaq Asy-Syathibi, yang berpendapat bahwa tujuan *maqashid al shariah* (*maqashid al-shari'ah fi al-shari'ah*) adalah untuk mewujudkan sebuah masalah kepada umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memahami *maqashid al shariah* adalah keharusan bagi semua umat Islam dalam berijtihad. *Maqashid al shariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *al shariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁸ Secara bahasa,

⁴⁶ Tampubolon dkk., *Birokrasi dan Good Governance*, 60-66

⁴⁷ Moenek dan Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, 34-33.

⁴⁸ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang *Maqashid Al-Syariah*." *Jurnal iain manado* 3, no. 2 (2023), <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

kata *maqashid syariah* terdiri atas dua kata *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁴⁹ Dalam berbagai aspek kehidupan, *syariah* mengatur perilaku individu dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum Islam. Konkritnya sebagai tujuan menuju jalan kehidupan yang baik dan di ridhai Allah SWT. *Maqashid syariah* memiliki fungsi dalam melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat, dan *ibqa* yaitu mencegah kerusakan atau cedera. *Maqashid syariah* ialah tujuan tertinggi yang digariskan oleh Allah SWT sebagai tujuan utama dari *syariah* yaitu sebagai pelestari kehidupan, pelestari agama, pelestari keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, serta pelestarian kekayaan. Konsep *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁵⁰

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Al-Syatibi

⁴⁹ Hamdani, *Konsep Corporate Governance Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019),

⁵⁰ Hamdani, *Konsep Corporate Governance Syariah*, 45-49

menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.⁵¹

b. Unsur-Unsur *Maqashid Syariah*

Dalam perspektif *syariah*, konsep *Good Governance* (tata kelola yang baik) juga diakui sebagai prinsip penting dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Namun, tata kelola yang baik dalam Islam tidak hanya bertumpu pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Imam *as-Syatibi*, berpendapat bahwa Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum ialah untuk masalah umat manusia di dunia dan akhirat.

Imam Ghazali memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan akal, keturunan, dan harta benda dalam *Maqashid*. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-mal*), Adapun lima pokok pengertian *maqashid syariah* yaitu:⁵²

⁵¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Masalah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101-102, https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid_%20Syariah%20dan%20Masalah.pdf

⁵² Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung:CV. Media Sains Indonesia, 2020), 38-70, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah-.pdf>

1) Perlindungan Agama (*hifdz ad-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
Tidak ada paksaan untuk (masuk) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2): 256).

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a) Memelihara agama dalam tingkatan *al-dharuriyah*, yaitu

memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.

Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.

b) Memelihara agama dalam tingkatan *al-hajiyyah*, yaitu

melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.

c) Memelihara agama dalam tingkatan *at-tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.

2) Perlindungan Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang paling utama yang diprhatikan Islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh dimusnahkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah SWT, kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmatnya, memuliakan dan memeliharanya, Allah SWT berfirman:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Anisa' 7 (5) ayat 29).

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *al-dharuriyyah*, seperti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita namun ketika tubuh sedang sakit sebaiknya cepatlah berobat ke rumah sakit terdekat atau

bisa ke klinik. Jika hal ini terabaikan akan memperparah keadaan tubuh serta jiwa kita.

b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *al-hajiyyah*, seperti ketika tubuh sudah sehat ada baiknya untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran jiwa. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

c) Memelihara jiwa dalam tingkatan *at-tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya bahwa kita diharuskan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan halal. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Perlindungan Akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. (QS. Al-Isra' ayat 70).

Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal manusia menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a) Memelihara akal dalam tingkatan *al-dharuriyyah*, seperti setiap orang pasti ingin memiliki pendidikan dasar yang memberikan kemampuan membaca serta menulis dan memahami ilmu-ilmu lainnya. Jika hal ini tidak di hindari maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkatan *al-hajiyyah*, seperti anjuran menuntut ilmu Pendidikan sesuai kebutuhan setiap individu. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam tingkatan *at-tahsiniyyah*, seperti seorang yang sedang melakukan pendidikan pastinya membutuhkan fasilitas untuk menunjang ilmu pengetahuan serta untuk mempedalam pengetahuan yang lainnya. Dalam hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, tetapi berakibat langsung pada diri sendiri.

4) Perlindungan Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- a) Memelihara keturunan dalam tingkat *al-dharuriyyah*, seperti pensyariaan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam tingkatan *al-hajiyyah*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misalnya. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak

menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis.

- c) Memelihara keturunan dalam tingkat *at-tahsiniyah*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika dan martabat seseorang.

5) Perlindungan Terhadap Harta Benda (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah SWT dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu baru dia menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan untuk berfoya-foya akan

mengakibatkan sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Maka Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْوَ زَيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS. Al-A'raf: 31).

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a) Memelihara harta dalam tingkatan *al-dharuriyyah*, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang *illegal*. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam tingkatan *al-hajiyyah*, seperti disyar'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam tingkatan *at-tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh

kepada keabsahan jula beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.⁵³

3. Organisasi Nirlaba

a. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, Yayasan dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang.⁵⁴ Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

⁵³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 1-179 .

⁵⁴ Ana Sopanah dkk., *Akuntabilitas Publik Organisasi Nirlaba* (Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2023), 41-42, <https://www.perpusnas.go.id/>.

b. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba yang berorientasi nirlaba berbeda dengan entitas yang berorientasi laba yaitu memiliki perbedaan. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nirlaba dengan entitas yang berorientasi laba yaitu dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nirlaba mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menurut ISAK 35, ciri perusahaan nirlaba atau organisasi non profit adalah organisasi yang sumber dana utamanya berasal dari sumbangan pihak anggota, di mana anggota yang telah menyumbang tidak menuntut organisasi untuk mendapatkan imbal hasil. Sebaliknya, para anggota yang menyumbang lebih tertarik untuk melihat impact atau hasil nyata dari dana yang disalurkan. Selain untuk sumbangan, dana yang diperoleh pun akan digunakan untuk operasional organisasi itu sendiri.

Menurut ruang lingkup ISAK 35 organisasi non profit atau nirlaba memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini:⁵⁵

- 1) Sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan

⁵⁵ Ana Sopanah dkk., Akuntabilitas Publik Organisasi Nirlaba, 45-46

2) Organisasi Nirlaba bisa menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak perlu dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas.

3) Di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Di mana artinya, dalam organisasi non profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya organisasi ini juga tidak perlu adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Sebagai gantinya, organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi.

Pada sebagian besar organisasi nirlaba, kontribusi (sumbangan) merupakan sumber utama pendapatan. Kontribusi

adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi atau suatu penyelesaian atau suatu pembatalan hutang-hutangnya, tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak bertindak sebagai pemilik. Dari pengertian tersebut, kontribusi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Transfer dilakukan tanpa syarat
- 2) Transfer ke atau dari suatu entitas yang bertindak bukan sebagai pemilik
- 3) Transfer dilakukan sukarela

4) Transfer tidak timbal balik.⁵⁶

c. Jenis-Jenis Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba bisa berbentuk organisasi kesejahteraan dan kesehatan, lembaga, dan universitas. Dan setiap jenis organisasi tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan organisasi, yaitu memberikan jasa (layanan) dan tidak mencari laba. Tapi tiap jenis organisasi tersebut bisa berbeda dalam hal sasaran, sumber pendanaan dan tingkat otonomi. Organisasi nirlaba dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) Instansi pemerintah, dalam penerapan akuntansinya tunduk pada Standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Bukan instansi pemerintah, dalam penerapan akuntansinya tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45, tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Terdapat pula berbagai macam jenis-jenis organisasi nirlaba secara umum yakni:

- a) Organisasi nirlaba bidang budaya dan pariwisata.
- b) Organisasi nirlaba di bidang pendidikan dan penelitian.
- c) Organisasi nirlaba di bidang kesehatan.
- d) Organisasi nirlaba bidang pelayanan sosial.
- e) Organisasi nirlaba bidang lingkungan.
- f) Organisasi nirlaba bidang pembangunan
- g) Organisasi nirlaba bidang kerelawanan.

⁵⁶ Winardi, *Teori Organisasi & Pengorganisasian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 114-130

- h) Organisasi nirlaba hubungan internasional.
- i) Organisasi nirlaba bidang sosial dan keagamaan.
- j) Organisasi nirlaba bidang pengembangan mikro dan koperasi.
- k) LSM dan Sektor Nirlaba.⁵⁷



⁵⁷ Winardi, *Teori Organisasi & Pengorganisasian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 155-158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *Maqashid Syariah* dengan menggambarkan hasilnya. Menurut Abdul Fattah dalam Moleong menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, perspektif, motivasi, Tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁸

Penelitian studi kasus adalah hal yang actual dan unik, bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau. Studi kasus digunakan saat ada suatu kasus atau peristiwa yang perlu diungkapkan kejelasan nya. Sebagaimana penelitian studi kasus memusatkan pada satu objek yang tentunya akan diangkat sebagai kasus yang perlu dikaji secara mendalam sehingga mampu untuk diselesaikan realitasnya seperti apa.

⁵⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 159-167, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091>.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek peneliti adalah sebuah organisasi nirlaba yang berada di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Sebuah Desa perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Dulunya Desa Keting ini jarang sekali dikunjungi oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Jika melihat dari pandangan orang awam pada dasarnya Desa Keting ini tidak banyak yang mengetahuinya, bahkan hingga sekarang ini. Alasan dari peneliti mengambil di Desa Keting untuk memperkenalkan serta memperkembangkan bahwasanya meskipun ini Desa paling ujung Kabupaten Jember namun terdapat sebuah organisasi yang mampu berdiri hingga beberapa tahun. Organisasi ini bernama Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi sosial yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama masyarakat. Peduli Sesama Kita memiliki sebuah kegiatan rutin tiap satu tahun sekali dan juga ada beberapa rutinan tiap minggunya. Dalam pembuatan laporan keuangan pun mereka belum mampu untuk membuat dikarenakan ketidaktahuan dalam pengelolaan. Alasan lainnya karena Desa Keting ini merupakan desa yang kecil bahkan tidak banyak orang mngetahui, dengan keberadaan sebuah Forum Organisasi Soial Peduli Sesama Kita Desa Keting ini mampu menjadikan Desa Keting lebih di ketahui oleh orang luar.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data dicari dan dijangkau sehingga kesaksiannya dapat dijamin.⁵⁹ Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, seperti orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti. Informan pada penelitian dipilih secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan pengurus inti atau staf aktif dalam organisasi nirlaba yang diteliti.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola organisasi dan prinsip *Good Governance*
3. Terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi program.
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan dapat dihubungi oleh peneliti.

⁵⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 55

Terdapat informan atau narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Mahkroji selaku Ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
2. Bu Dewi selaku bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
3. Bipit selaku anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
4. Bapak Rudi selaku Kepala Dusun Krajan 2 Desa Keting

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari nproses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah teknik dasar semua ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk memaparkan data.⁶⁰ Observasi yang dilakukan penelitian ini yaitu observasi partisipatif yang tergolong dalam partisipasi pasif. Peneliti datang secara langsung di tempat kegiatan orang yang diamati, tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut⁶¹, akan

⁶⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 226.

⁶¹Sugiyono, 228

tetapi datang untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung dengan peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian pada proses wawancara, peneliti memperoleh data berupa ⁶²

- a. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- b. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- c. Penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- d. Penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar,

⁶² Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 23-25, https://play.google.com/store/books/details?id=lf7ADwAAQBAJ&source=gbs_api.

prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan memperkuat data yang sudah ada. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁶³

Penelitian ini memperoleh dokumentasi dari pihak forum organisasi sosial peduli sesama kita berupa foto, gambar, struktur, atau segala bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama

Kita. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan

⁶³ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 35-34, <https://www.perpusnas.go.id/>.

sketsa, menyusun ke (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁶⁴

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya "diproses" kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).⁶⁵ Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan tujuan peneliti tentang prinsip *Good Governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari data yang didapat dari hasil pencarian

⁶⁴ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Perpustakaan Ilmu Grup, 2020), 220-230, <https://www.perpusnas.go.id/>.

⁶⁵ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014), 190-199, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20399460>.

datanya.⁶⁶ Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal penting dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak berkaitan dengan judul penelitian

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁷ Peneliti memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁶⁸ Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

⁶⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 225-226, https://www.researchgate.net/publication/314093441_Dasar_Metodologi_Penelitian.

⁶⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 124.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menunjukkan keaslian serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁹ Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain tujuannya yaitu membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.⁷⁰

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti bukti dokumentasi, penerapan prinsip *good governance* dalam perspektif *maqashid syariah* pada organisasi nirlaba. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya. Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan mewawancarai anggota ini, melakukan observasi kegiatan rapat, dan

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, 230

⁷⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 178-179, <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/>.

memeriksa dokumen keuangan organisasi. Selain itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari ketua, bendahara, dan anggota. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan secara internal, tanpa publikasi kepada masyarakat, sehingga menunjukkan transparansi belum diterapkan secara menyeluruh.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai awal sampai akhir. Ada beberapa step yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian sebagai berikut:

Pertama, yaitu tahap pra lapangan hal-hal yang harus dilakukan yaitu sebelum turun lapangan. Langkah pertama yaitu pengajuan judul skripsi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi setiap masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai metode penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian. Tahap selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan menentukan lokasi penelitian yang sesuai sama judul yang diajukan.

Kedua, yaitu pekerjaan lapangan. Pada langkah ini peneliti diajukan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti yakni tempat forum organisasi sosial peduli sesama kita yang berada di desa keting. Melakukan observasi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita untuk melakukan

wawancara kepada subyek penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk merekam suatu data yang dikumpulkan.

Ketiga, tahap pasca lapangan. Setelah tahap pengumpulan data selesai, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu analisis data information dan pengolahan data. Setelah semuanya selesai, saatnya memasuki tahap akhir yaitu menulis laporan hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita merupakan suatu organisasi yang terletak di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Desa Keting merupakan suatu desa tua yang dimana terletak pada perbatasan langsung Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita termasuk dalam organisasi nirlaba, yakni tidak mencari sebuah keuntungan finansial lebih mengutamakan peran dalam mengatasi isu masalah sosial serta sebagai jembatan dalam mengadvokasikan hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan publik.

Pada awal berdiri nya organisasi ini bernama Rumah Peduli Sesama Kita yang didirikan oleh 7 warga Desa Keting yang memiliki tujuan bersama untuk merangkul semua aspek di Desa Keting. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita berdiri pada tahun 2020 hingga saat ini.⁷¹ Selama 5 tahun lebih forum organisasi sosial peduli berdiri, banyak tantangan serta rintangan yang telah di lewati. Pada awal nya kegiatan ini hanya untuk sekedar membantu masyarakat namun dengan berjalan nya waktu perlahan forum organisasi sosial peduli sesama kita memiliki beberapa program kegiatan rutin yang di ikuti oleh semua

⁷¹ Makroji, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Januari 2025

kalangan masyarakat dari anak – anak hingga lansia yang sudah berumur. Kegiatan rutin seperti *Little Star*, Senam Lansia, dan *Aerobic Srikandi*.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan Forum Organisasi Peduli Sesama Kita berkarater sosial dini, menjadi Gerakan kebersamaan tanpa kepentingan pribadi, terciptanya organisaasi yang manfaat maslahat buat sesama.

b. Misi

- a. Menjalin hubungan kebersamaan yang baik di masyarakat
- b. Punya jiwa tolong menolong untuk sesama tanpa batas
- c. Meninggalkan ego atau kepentingan pribadi
- d. Jauh dari perbuatan memanfaatkan dan dimanfaatkan
- e. Terciptanya jiwa sosial yang Ikhlas ⁷²

3. Lokasi

Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita berlokasi di Jalan Krajan II, Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.⁷³

⁷² Observasi di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, 28 September 2024

⁷³ Observasi di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, 28 September 2024

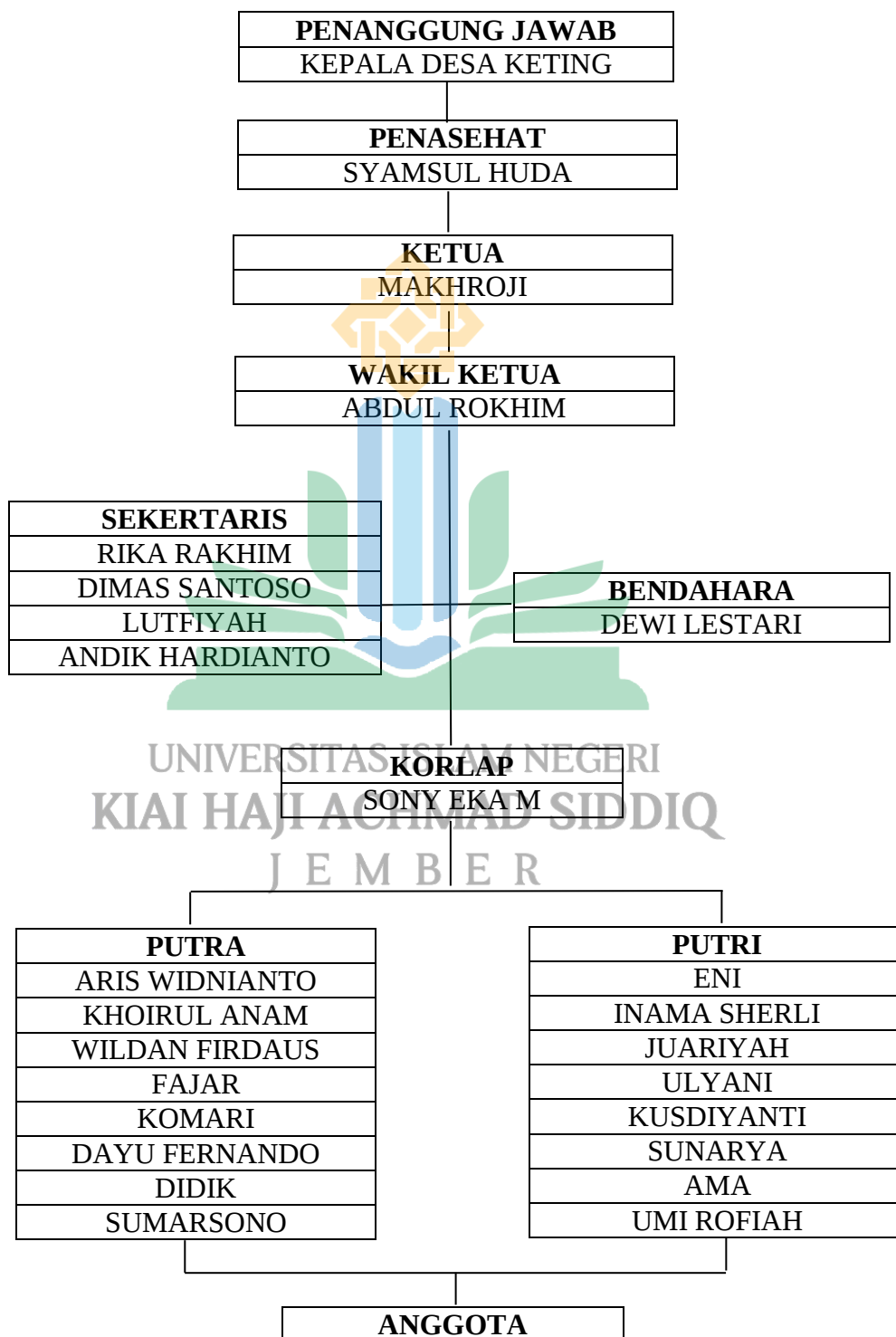
4. Struktur Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu susunan struktur seperti Forum Organisasi Peduli Sesama Kita yang terdiri dari Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Desa Keting, terdapat penasehat yang dijabat oleh sesepuh Desa Keting, terdapat juga ketua yang dijabat sendiri oleh bapak Makroji, wakil ketua, sekertaris, bendahara serta terdapat pula korlab. Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagian di bawah ini:



Gambar 4.1

Struktur Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita



Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan organisasi yang berfokus pada titik bagaimana tujuan utama mereka yakni sebagai pelayanan sosial, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, serta bidang lainnya tanpa mencari finansial. Tugas dan fungsi dari Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan visi dan misinya.
- b. Melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan bidangnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
- c. Melatih kesadaran individu atau komunitas atas pentingnya pengembangan di kehidupan sosial.
- d. Mengkaji isu atas permasalahan yang ada di masyarakat serta mencari solusi bersama.
- e. Meningkatkan kerjasama kemitraan antar organisasi maupun pemerintahan.⁷⁴

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi bagian Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita secara khusus sebagai berikut:

- a. Ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
 - 1) Membantu merancang strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan tujuan organisasi

⁷⁴ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Januari 2025

- 2) Memimpin dan memastikan anggota tim bergerak selaras dengan tujuan organisasi
 - 3) Memantau pelaksanaan program, mengevaluasi hasil, dan memastikan keberlanjutan organisasi
 - 4) Memastikan lingkungan organisasi yang kondusif dengan komunikasi antar anggota
 - 5) Memimpin rapat rutin
 - 6) Menyetujui atau menolak pemberian dan donator yang tidak sesuai dengan visi misi Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- b. Sekertaris Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- 1) Mencatat hasil dari rapat rutin dalam Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
 - 2) Memastikan jadwal rutin terlaksana dengan tepat serta berjalan dengan lancar
 - 3) Memastikan dokumen arsip serta file tersimpan dengan benar
 - 4) Menyusun dan mendistribusikan surat, email, atau pengumuman terkait aktivitas organisasi
 - 5) Memegang buku hadir pengurus dan hadir tamu kunjungan di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- c. Bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
- 1) Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail dalam Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

- 2) Menyusun anggaran kegiatan atau *event* yang akan di adakan nantinya
- 3) Memastikan penggunaan dana dengan sesuai
- 4) Melaporkan hasil laporan keuangan pada saat rutinan Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

5. Unit Program Kegiatan Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki beberapa program kegiatan unggulan diantaranya:

a. *Little Star*

Little star merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yakni dengan memberikan pembelajaran tambahan di hari weekend dengan berbagai macam teknik pengajaran namun dengan berbasis bahasa Inggris. *Little star* bisa disebut sebagai les privat tanpa membayar kepada yang mengajarkan pembelajarannya. Dimana dalam pembelajaran ada beberapa tingkatan kelas dalam satu forum kegiatan tersebut.⁷⁵ Tingkatan pada *little star* terdiri dari tiga bagian, yang pertama ada untuk kelas kecil yaitu anak yang masih berada di bangku taman kanak-kanak (TK) serta sekolah dasar (SD) kelas 1. Yang kedua ada dari kelas sedang yaitu dari sekolah dasar (SD) kelas 2 dan sekolah dasar kelas 3. Yang terakhir ada untuk kelas besar yaitu dari kelas sekolah dasar 4,5 dan 6.

⁷⁵ Bibit, diwawancara oleh Penulis, Jember 14 Maret 2025

Kegiatan pada *little star* biasanya saat *weekend* yaitu hari minggu jam 09.00 pagi, anak-anak akan berkumpul dan menunggu guru yang mengajar atau biasa disebut bunda oleh anak-anak *little star*. Terdapat dua orang pengajar atau bunda-bunda yang mengajarkan. Bunda-bunda ini mereka mengajar dengan secara Ikhlas tanpa harus di gaji sedikitpun, dengan rasa sukarela kegiatan *little star* ini tetap berjalan hingga saat ini. Pembelajaran di *little star* biasanya meliputi materi perhitungan matematika memakai bahasa Inggris. Seperti untuk kelas sedang biasanya diberi materi gambar dengan angka yang di hitung tetapi dalam bahasa Inggris. Dalam pengajaran diberi waktu selama 1 jam untuk para anak-anak untuk membaca, mengerjakan, dan menghafal materi yang telah diberikan, setelah itu para anak-anak akan di pulangkan dengan berbaris dan diberi makanan ringan yang sehat untuk membuat mereka merasa senang.

Dengan diadakan nya kegiatan *little star* pada Desa Keting merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para masyarakat. Para anak-anak yang mengikuti les *little star* bukan hanya dari Desa Keting saja ada beberapa dari desa sembrang yang bisa mengikuti les *little star*. Selain untuk mendalami ilmu pengetahuan, bisa untuk menambah teman serta anak-anak bisa bermain sambil belajar tanpa adanya biaya yang di keluarkan untuk membayar sedikitpun.

b. Senam Lansia

Senam lansia diperuntukan untuk para masyarakat keting maupun luar keting yang telah berusia lansia atau manula. Kegiatan ini awal mula di adakan oleh pemerintah Desa Keting atau Postu yang mana diadakan sebulan sekali, hal ini yang menjadi keluhan masyarakat sebagai pelaku yang mengikuti kegiatan. Dari hal ini muncul sebuah pendapat dan saran untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan mengadakan senam lansia seminggu sekali yang bertempat di halaman Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita.

Senam lansia pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita diselenggarakan setiap seminggu sekali terdapat iuran kas setiap pertemuannya. Dana kas dari para lansia itu tidak masuk dalam keuangan pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, melainkan digunakan langsung oleh para lansia untuk keperluan bersama-sama. Dari diselenggarakannya kegiatan senam lansia pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memberikan sebuah keuntungan bagi Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yakni dengan memperluas perkembangan serta memperkenalkan bahwasannya ada sebuah program untuk para lansia-lansia di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita pada Desa Keting.

c. Senam *Aerobic*

Senam *aerobic* diikuti oleh para anak muda dan dewasa atau bisa disebut srikandi Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Kegiatan ini diadakan setelah adanya pemberian ide untuk membuat masyarakat Desa Keting sehat bersama-sama. Kemunculan ide senam *aerobic* ini dengan usulan kegiatan ini yang awalnya hanya terdapat senam khusus lansia saja kini ada senam *aerobic* untuk masyarakat yang ingin sama-sama menjaga kesehatan jasmani dengan gratis tanpa bayar. Diadakannya kegiatan senam *aerobic* ini bukan hanya untuk melatih kebugaran saja namun untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat Desa Keting meskipun berbeda Dusun Krajan saja.⁷⁶

Namun adanya senam *aerobic* ini juga memiliki persyaratan waktu kegiatannya yakni dengan tidak memakai pakaian yang kurang bahan atau tidak pantas untuk dilihat oleh masyarakat umum, diharuskan memakai pakaian yang layak dan tentu hal tersebut disetujui oleh pencetus ide tersebut. Dari kegiatan inilah tumbuh rasa keinginan untuk selalu sehat dan menjaga kesehatan tubuh masing-masing dari kita.

⁷⁶ Dewi, di wawancara oleh Penulis, Jember, 14 Maret 2025

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan dengan sistem penyampaian informasi secara jelas, akurat, dan mampu untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi bukan hanya masalah tersediaan informasi yang mudah diakses, tetapi juga bagaimana kualitas informasi yang disajikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makhroji selaku ketua di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita menyatakan sebagai berikut:

“Untuk tranparansi itu mba biasanya di Forum Organisasi Peduli Sesama Kita ini ada dana donasi langsung kita share di grup wa mau itu berapapun nominal pasti di share dan kita catat, untuk terkait para donatur itu tidak selalu menanyakan perihal dana nya itu akan disalurkan pada kegiatan apa saja mba, namun mereka hanya akan bertanya sekilas untuk kegiatan ini berapa habis dana nya itu saja. Kita juga sebagai organisasi mempunyai kebijakan juga untuk tidak memaparkan keseluruhan informasinya untuk berjaga-jaga”.⁷⁷

Pernyataan dari ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Seama Kita diperkuat oleh pernyataan dari Bendahara yaitu Dewi yang menyatakan bahwa: “Biasanya mba jika ada dana donatur itu sama pak ketua langsung di informasikan, kalok terbuka ke masyarakat sih gak sebegitu, ya kadang ada beberapa masyarakat yang nanya dana nya itu dapat dari mana, langsung di jawab ada dari donatur gitu sih”.⁷⁸

⁷⁷ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember 14 Maret 2025

⁷⁸ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember 14 Maret 2025

Pernyataan diatas juga ditunjang oleh pernyataan dari salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang menambah pendapat sebagai berikut:

“Tranparansi itu ada mba di share lewat grup wa, mau berapa nominal itu pak ketua langsung share mba, kalok terbuka ke masyarakat itu gak tentu, tapi beberapa kali emang ada yang bertanya dana nya itu dapat darimana gitu, biasanya saya atau temen-temen yang lain langsung jawab kalok dari dana donatur itu saja ma ba, setau saya sih untuk tranparan ke donatur ya sendiri gak pernah nanya mba, mungkin udah percaya gitu sama organisasi ini jadi mereka pada donatur gak pernah bertanya terkait dana-dana itu digunakan untuk apa saja”.⁷⁹

Selain daripada itu peneliti disini juga mewawancarai Kepala Dusun Krajan II sebagai pelindung atau pembina yaitu Bapak Rudi untuk memperkuat pernyataan dari beberapa pengurus serta anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita.

” Saya sendiri hanya tau transparansi dana itu sewaktu ada rapat untuk kegiatan saja mba, contoh nya sewaktu mau diadakan kampung *jadoel* itu dikasih tau dana yang dibutuhkan terus nanti setelah kegiatan selesai itu ada rapat untuk membahas dana-dana dari kampung *jadoel* itu, biasanya tidak ada sisa mba untuk dana kegiatan nya itu. Untuk transparan ke masyarakat itu mungkin ada kebijakan sendiri dari organisasi nya mba”.⁸⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengimpelementasian prinsip tranparansi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah melakukan tranparansi dengan kebijakan dari organisasi tersendiri.

⁷⁹ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 Maret 2025

⁸⁰ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 Maret 2025

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada pihak yang berwenang. Biasanya pertanggung jawaban ini mencakup keterangan terkait kinerja atau kegiatan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi. Menurut Bapak Makhroji selaku ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, menyatakan sebagai berikut:

“Jadi setiap kita ada kegiatan seperti kemarin itu kan dari awal sudah di jelaskan biaya dana untuk kegiatan nya nah itu gak harus full kan sebenarnya, misal seandainya rancangan dana yang kita butuhkan itu sekian juta gitu ya, terus ada uang masuk separuh dari rancangan dana kita nah sisa nya biasanya dapat dari kita-kita kan, untuk uang donasi itu biasanya kita lebih diperjelaskan mba untuk dimanfaatkan kemana saja. Tapi kadang mba ada beberapa kegiatan yang kolaborasi atau organisasi kita membutuhkan bantuan lain itu biasanya dibagi rata mba, contoh khitanan massal itu kemarin minta bantuan beberapa medis kan terus sisa dari dana khitan itu kita kasih ke tenaga medis itu sebagai uang transport meskipun terkadang mereka menolak. Untuk pelaporan kepada donatur itu sudah kita lakukan, namun ya mereka tidak pernah bertanya uang donasinya dikemanakan karena mereka sangatlah percaya dengan organisasi ini mba, namun beberapa kali kadang mereka bertanya dana untuk sehari kegiatan besar habis itu berapa itu saja mba. Dengan kata lain pertanggung jawaban yang kita lakukan itu yaitu memaparkan laporan serta rincian penggunaan dana maupun kegiatan organisasi melalui rapat rutinannya itu saja mba, tapi saya juga pengen temen-temen semua ini menerapkan setiap kegiatan itu di catat sebagai administrasi di dalam organisasi ini.”⁸¹

⁸¹ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember 14 Maret 2025

Berdasarkan pernyataan dari ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Bapak Makhroji diperkuat dengan pendapat Dewi selaku bendahara juga mengatakan hal yang serupa, yakni:

“Iya mba kalok ke donatur itu emang jarang biasanya mereka nanya sendiri, bukan berarti kita gak ngasih tau tapi ya emang fakta nya mereka percaya sama kita, tapi yaa kita lebih menginformasikan ke awal-awal saja untuk dana nya.”⁸²

Bipit Salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengatakan hal yang sama untuk mendukung pendapat tersebut yaitu:

“Selama ini memang gak pernah ada mba soal laporan ke para donatur itu, sempet sih dilakuin sepertinya tapi ya karena emang mereka para donatur itu sudah percaya sama organisasi kita mba, kalok ada dana seperti yang saya sudah-sudah mba pasti akan dipaparkan ke grup wa, dan kadang juga ada rapat rutin perbulan di awal untuk mempertanggung jawabkan kegiatan atau keuangan.”⁸³

Pada bagian ini peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Krajan II yaitu Bapak Rudi yang mengatakan:

“Kalau untuk hal itu saya kurang lebih kalok gak salah sewaktu ada undangan rapat itu dipaparkan laporannya tapi ya gitu tidak semua, ya memang ini untuk terkait apapun tentang organisasi ini itu di kalangan beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui terkait dana-dana tersebut meskipun organisasi ini sudah banyak membantu masyarakat Desa Keting. tapi untuk laporan terkhusus ke donatur itu saya kurang paham yaa kan itu kebijakan dari organisasi nya”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, bendahara, anggota dari Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita serta

⁸² Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Maret 2025

⁸³ Bibit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Maret 2025

⁸⁴ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Maret 2025

Kepala Dusun II sebagai pembina atau pelindung, dalam melakukan kewajiban pelaporan pertanggung jawaban berbentuk buku notulen sederhana yang disampaikan melalui rapat rutin.

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Kegiatan di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
Pemasukan			
Saldo awal			Rp. 4.000.000
Donasi masuk			Rp. 250.000
Donasi masuk			Rp. 60.000
Donasi masuk			Rp. 100.000
Total			Rp. 4.410.000
Pengeluaran			
Roti susu	160	Rp. 4.500	Rp. 720.000
Snack	80	Rp. 9.000	Rp. 720.000
Wafer nabati	80	Rp. 18.000	Rp. 1.440.000
Pisang coklat	50	Rp. 5.000	Rp. 250.000
Snack	50	Rp. 5.000	Rp. 250.000
Biaya lain-lain			Rp. 500.000
Total pengeluaran			Rp. 3.880.000
			Rp. 4.410.000
Sisa uang			Rp. 530.000

Sumber: data diolah penulis

3. Penerapan Prinsip Independensi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Independensi atau kemandirian merupakan sikap dan kondisi yang memungkinkan individu atau organisasi untuk bertindak secara objektif, jujur dan adil, dalam melaksanakan keputusan, keputusan, tugas atau ulasan, dari pihak lain, dari pengaruh, tekanan, atau kepentingan orang lain. Hasil wawancara bersama Bapak Makhroji sebagai ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengatakan sebagai berikut:

“Kita pengen nya ketika ada keputusan kegiatan dari kita sendiri, meskipun ya kegiatan kita beberapa kali mitra dengan polsek dan mitra dengan pemerintah desa. Namun untuk kegiatan murni Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tidak mau di otak-atik dan kita memegang teguh sikap kemandirian kita sebagai organisasi mba. Tapi mau bagaimana pun organisasi ini kan tetap pembina yakni pemerintah desa jadi kalua kita ada kegiatan tetap ada laporan ijin gitu selebih nya sudah tidak ikut campur.”⁸⁵

Penyataan di atas dipekuat dengan pernyataan dari Dewi selaku bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengatakan hal yang sama yakni:

“Selama 6 tahun organisasi berdiri selalu mengutamakan kemandirian sebagai kunci untuk organisasi ini tetap berdiri mba, contoh seperti dulu sempat terjadi situasi yang tidak enak antara organisasi dengan Kepala Desa Keting, dari hal inilah kita tetap menjaga prinsip independensi untuk tetap berdiri tanpa dikendalikan pihak luar, mungkin ini ya untuk ke pemerintah desa lebih ke ijin sebagai laporan kalua ada kegiatan besar gitu”.⁸⁶

⁸⁵ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, 16 April 2025

⁸⁶ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

Hal ini diperkuat juga pendapat dari Bipit salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengatakan hal yang sama yaitu: “Kita memiliki idenpendensi mba, meskipun ada kegiatan besar kita tetap ijin ke pemerintah desa sebagai pembina kan, tapi selain itu pemerintah desa tidak boleh terlalu jauh, karena dulu sudah terjadi hal yang tidak menyenangkan, sebagai kewaspadaan untuk yang lain”.⁸⁷

Selain dari pengurus dan angora penulis juga mewawancari Bapak Rudi selaku Kepala Dusun Krajan II mengatakan hal yang serupa yakni senagai berikut:

“Jadi yang akan di rencanakan oleh Forum Organisasi Sosial nomor satu memang membuat ijin laporan ke pemerintah desa dulu semacam pemberitahuan, setelah itu terkait donatur atau pelaksanaan mereka sangatlah independen sudah paham apa yang akan dilakukan selanjutnya, selain itu sudah tidak mengikut campur lagi, karena dulu sempat ada masalah antara desa dan organisasi ini”.⁸⁸

Dari hasil wawancara bersama ketua, bendahara, anggota serta Kepala Dusun Krajan II, mengatakan bahwa pengambilan sikap independensi atau kemandirian pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sangatlah terjaga dan tidak ada toleransi pada siapapun pihak luar yang ingin menekan atau memanfaatkan organisasi ini, meskipun sempat terjadi masalah dengan pemerintah desa dulunya.

⁸⁷ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁸⁸ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

4. Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Dalam pengelolaan dana Forum Organisasi Sosial peduli Sesama Kita telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama terutama dalam hal ini nilai agama yang di maksud adalah maqashid syariah yang mana maqashid syariah sendiri memiliki 5 nilai yaitu *hifzad-din* (menjaga agama), *hifzan-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), dan *hifzan-nasl* (memelihara keturunan). Melalui wawancara dengan ketua dan bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, terungkap bahwa nilai-nilai agama memang dijadikan panduan untuk mencapai tata kelola organisasi yang lebih jujur, adil dan transparan dalam merencanakan maupun melaksanakan semua program yang ada meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan.

a) Perlindungan Agama (*Hifdzun Al-Din*)

Pada konteks ini berkaitan menjaga, melindungi, dan menegakkan ajaran agama Islam agar tetap terjaga kemurniannya dalam keyakinan, ibadah, akhlak, serta praktik sosial. Dalam Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sering mengadakan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang didukung pula oleh mayoritas lingkungan di Desa Keting adalah muslim. mencoba menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan dengan prinsip islam agar dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan program, serta

dapat memelihara amanah dengan cara menerapkan keagamaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam bentuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan independensi. Amanah yang telah diberikan masyarakat dan dijaga akan mencerminkan kecerdasan yang dilandaskan dengan sifat jujur dimana mereka menyampaikan setiap kendala atau rancangan dalam mengadakan kegiatan organisasi. Hal ini diungkap oleh ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yakni Makhroji sebagai berikut:

Alhamdulillah selama ini kita menyediakan informasi itu lewat grup whatsapp untuk memberitahukan seperti setiap kegiatan serta melalui rapat yang diadakan oleh organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana fitnah yang bisa merusak ajaran agama, hal ini sangat kita hindari untuk tetap memperkokoh organisasi.⁸⁹

Supaya memperkuat jawaban diatas peneliti melakukan wawancara dengan bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Dewi yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk menjaga agama ya ini kita setiap ada HBI selalu meramaikan bersama masyarakat Desa Keitnmba, apalagi mayoritas kebanyakan muslim sama kita membenahi makam bersama-sama yang diketuai oleh bapak makhroji sendiri selaku ketua psk. Dana-dana yang yang digunakan untuk setiap kegiatan pun kita sudah amanah ya mba dengan mengadakan rapat diawal hingga akhir”.⁹⁰

Untuk menunjang wawancara diatas peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang mengatakan demikian:

⁸⁹ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁹⁰ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

“Selama ini organisasi sudah termasuk amanah, seperti langsung memberitahu lewat media sosial pribadi milik organisasi, namun namanya juga organisasi pasti tidak semua akan diterbuka ke masyarakat umum terdapat batasan juga”.⁹¹

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan pengurus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita penulis juga mewawancarai kepala Kepala Dusun Krajan II yakni Bapak Rudi untuk mendapat jawaban lebih akurat apakah Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah melakukan akuntabilitas, transparansi, dan independensi terhadap masyarakat. Berikut jawabannya:

“Ini ya mba terdapat rapat setiap kegiatan nya, di waktu rapat dipaparkan dana yang dibutuhkan, selesai kegiatan pun diinformasikan terkait kegiatannya itu seperti apa saja, selain itu sih saja kurang tau ya mba, itu kebijakan dari organisasi sendiri tapi selama ini yang saya liat mereka menggunakan dana-dana donasi itu dengan sesuai porsi nya jadi bisa dikatakan transparan namun dengan beberapa kebijakan”.⁹²

Dari hasil wawancara bersama ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita serta Kepala Dusun Krajan II mengatakan perspektif *maqashid syariah hifdzun al-din* sudah dilakukan dengan menerapkan pemaparan informasi melalui media sosial dan mengadakan rapat yang juga ada beberapa kebijakan, serta kegiatan-kegiatan HBI di Desa Keting.

⁹¹ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁹² Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

b) Perlindungan jiwa (*Hifdzun Al-Nafs*)

Pada prinsip *maqashid syariah*, konteks ini berhubungan dengan kesejahteraan jiwa. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah sangat membantu masyarakat Desa Keting maupun luar Desa dengan memberikan pelayanan secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan transportasi berupa ambulance yang dimiliki oleh organisasi. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memelihara jiwa mereka dari sifat serakah dengan tetap peduli dan mengedepankan musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita pada saat diwawancara yang menyatakan:

“Kita juga mempunyai program pertama Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita semacam pinjaman dana untuk masyarakat yang membutuhkan, ada maksimal nya itu seratus ribu tapi kadang ada yang melebihi karena kebutuhan mereka yang lebih. Pinjaman dana ini tidak seperti pinjaman yang lain, di sini tidak di tekan mengenai bunga dalam meminjam nya, jadi dalam pengembalian nya tetap sama seperti diawal. Diadakan nya program ini untuk meniadakan pinjaman rentening yang bisa membuat masyarakat Desa Keting terbebaskan oleh bunga yang tinggi”.⁹³

Dalam hal ini, untuk mengoptimalkan pendapat diatas penulis juga mewawancara bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Dewi yang mengatakan:

“Ini kan di Desa Keting banyak yang pinjem di rentenir gitu apalagi bunga yang tinggi, nah dari Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sewaktu awal dulu itu mengadakan program pinjaman tanpa bunga ke masyarakat Desa Keting

⁹³ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

supaya mereka itu gak pinjem ke rentenir lagi kasian kan masyarakat nya dengan kondisi ekonomi yang kurang mba”⁹⁴

Selain itu terdapat informan lain yang penulis wawancarai yaitu salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Bipit mengatakan hal yang serupa: “Kemungkinan ini mba program pinjaman dana itu buat masyarakat biar gak pinjem ke rentenir itu kan di Desa Keting ini banyak kayak gitu, dari kejadian itu banyak masyarakat yang terganggu”.⁹⁵

Untuk memperkuat pendapat dari anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita penulis mewawancarai Kepala Dusun Krajan II yaitu Bapak Rudi yang mengatakan: “Ini sih mba dulu ada pinjaman uang diperuntukan masyarakat yang membutuhkan, di Keting ini banyak utang ke rentenir gitu kan nah baru setelah ada organisasi ini ya berkurang secara perlahan”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, bendahara, anggota dari Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, dan juga Kepala Dusun Krajan II penerapan nilai-nilai *maqashid syariah hifdzun al-nafs* dengan memberikan program pinjaman dana tanpa bunga untuk mensejahterakan masyarakat Desa Keting yang membutuhkan.

⁹⁴ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁹⁵ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁹⁶ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

c) Perlindungan Akal (*Hifdzun Al-Aql*)

Pada konteks ini berhubungan dengan keterbukaan informasi dana untuk pengembangan intelektual dan pendidikan. Peneliti menemukan bahwa pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki program unggulan dalam pengembangan intelektual serta Pendidikan bagi masyarakat Desa Keting. Menurut hasil wawancara dengan ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, yaitu Bapak Makhroji mengatakan sebagai berikut:

“Dana dari donatur ya kita gunakan untuk pengembangan Pendidikan juga seperti menyediakan program *Little Star* itu mba, biasanya selesai adik-adik belajar itu diberikan snack atau minuman. Dana yang digunakan bukan hanya dari donatur tapi bisa dari pemberian wali murid atau uang pribadi kita masing-masing mba. Tapi untuk semacam edukasi ke masyarakat atau kajian gitu ya mba gak pernah karena ya itu terbentur dana. Kita lebih ke Pendidikan untuk anak-anak saja”.⁹⁷

Pernyataan dari ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bendahara yaitu Dewi yang mengatakan:

“Ya ini kan ada *Little Star* mba bisa digunakan untuk itu tapi ada dana tambahan dari yang lain misalnya wali murid, bisa juga dana dari masing-masing mba seperti dana dari pak ketua sendiri, itupun dengan rasa keikhlasan mba tau sendiri seperti apa sistem organisasi di sini kan, dan setiap kegiatan itu sudah pasti akan dilaporkan melalui grup wa mba seperti biasanya”.⁹⁸

⁹⁷ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

⁹⁸ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

Selain itu salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita juga menekankan dalam pengembangan Pendidikan yang menyatakan yaitu:

“Selama ini untuk mengembangkan pendidikan ke masyarakat lewat *Little Star* mba, dengan diadakan nya semacam les gitu biar anak-anak kecil di Desa Keting juga memiliki ilmu tambahan, ya untuk dana nya masih tetap sama dari beberapa donatur terus ada dari wali murid atau bisa dari masing-masing anggota”.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwa Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita pengembangan *Little Star* untuk memberikan Pendidikan secara gratis di Desa Keting didapat dari dana dari beberapa donatur untuk membantu kemajuan pengetahuan.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Krajan II yaitu Bapak Rudi yang mengatakan: “Kemungkinan digunakan untuk *Little Star* ya mba, kegiatan itu sangat membantu Pendidikan anak-anak di sini mba, terkait pengolaan dana itu saya kurang mengetahui”.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita serta Kepala Dusun Krajan II mengatakan bahwa nilai-nilai *maqashid syariah* *hifdzun al-aql* pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita dengan mengadakan program *Little Star* yang di khususkan untuk anak-anak.

⁹⁹ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

¹⁰⁰ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

d) Perlindungan Keturunan (*Hifdzun Al-Nasl*)

Hifdzun al-nasl adalah menjaga keberlangsungan, kehormatan, dan kualitas keturunan manusia. Hal ini berhubungan dengan moralitas pada generasi selanjutnya. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah berupaya untuk menjaga martabat organisasi untuk keberlanjutan generasi selanjutnya namun ada sedikit kendala yang mereka hadapi untuk melangsungkan pembentukan atau perekrutan generasi selanjutnya. Namun hal itu tidak membuat organisasi berhenti untuk melakukan kegiatan sosial ada beberapa yang dilakukan. Seperti hasil wawancara dengan ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Bapak Makhroji mengatakan:

“Kita memang ada kendala dalam perekrutan untuk generasi selanjutnya, namun untuk menjaga moralitas kita menerapkan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sosial yang kita laksanakan, seperti merenovasi makam, dan kita sempat memberikan wawasan kepada anak-anak kecil di *Little Star* untuk menumbuhkan jiwa sosial dengan mengajak mereka dalam kegiatan kunjungan ke panti jompo”.¹⁰¹

Hal ini diperkuat oleh Dewi selaku bendahara sebagai berikut: “Agak susah ya mba untuk saat ini masih belum ada regenerasi anak muda di sini lebih memilih untuk merantau dari pada menetap di Desa Keting ya kita hanya fokus pada anak-anak kecil di *Little Star* itu saja sih”.¹⁰²

¹⁰¹ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

¹⁰² Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

Selain itu penulis juga mewawancara salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang menyatakan: “Dari dulu mungkin sudah di usahakan bagaimana regenerasi untuk organisasi tapi sekali lagi faktor dari lingkungan Desa Keting ya anak muda nya kurang minat dan semua pada merantau di luar kota”.¹⁰³

Dapat disimpulkan bahwa pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengalami kesulitan merekrut dan mencari pengganti dalam organisasi.

Dalam hal ini didukung oleh pendapat hasil wawancara dengan Kepala Dusun Krajan II Bapak Rudi mengatakan hal yang sama yaitu: “Jika dilihat dari kondisi Desa Keting ini kemungkinan agak sulit ya mba, anak muda di sekitar sini banyak merantau tapi ada sebagian yang menetap namun ya gitu kurang minat kalok jiwa sosialnya”.¹⁰⁴

Hasil wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, dan juga Kepala Dusun Krajan II, mengatakan nilai-nilai *maqashid syariah hifdzun al-nasl* pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memiliki kesulitan dalam melakukan regenerasi selanjutnya disebabkan oleh faktor keadaan di Desa Keting.

¹⁰³ Bipit, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

¹⁰⁴ Rudi, diwawancara oleh Penulis, Jember 16 April 2025

e) Perlindungan Harta (*Hifdzun Al-Mal*)

Pada konteks ini memastikan seluruh pengolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan. Prinsip ini sangat penting karena mereka mengelola dana publik, donasi, dan bantuan lainnya yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan transparan. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita juga mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada masyarakat dengan menyampaikan bagaimana dana tersebut diperoleh serta bagaimana proses penggunaan anggaran secara transparan meskipun terkadang terdapat beberapa kebijakan yang tentunya tidak bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga integritas organisasi. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita dinilai tidak efektif pada saat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat kadang berpikir bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak disampaikan pihak organisasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, mengatakan: “Untuk itu kita sudah lakukan cuman pertanggung jawaban itu justru donatur kita sepenuhnya diserahkan ke kita jadi gak pernah menanyakan uang donasi nya itu di buat apa saja, mungkin ya nanya habis berapa itu saja kurang lebih nya, kita juga sangat menjaga alur dana-dana itu namun jika untuk terlalu terbuka kepada masyarakat kita tidak sempurna, ada hal yang tidak

bisa disampaikan juga”.¹⁰⁵ Pernyataan diatas diperkuat dengan wawancara bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yaitu Dewi yang mengatakan:

“Beberapa kali sudah dilakukan mba tapi ya gitu emang donatur kita sangatlah percaya kepada organisasi jadi mereka tidak pernah bertanya karena kita juga kan sangatlah menjaga kepercayaan dari donatur mba supaya tetap terjaga eksistensi sebagai organisasi sosial yang mana kita juga memiliki program rutin”.¹⁰⁶

Pernyataan diatas ditunjang oleh pendapat salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang mengatakan:

“Kita dulu sudah melakukan hal tersebut tapi sekali lagi dari donatur itu tidak pernah bertanya terkait donasi mau digunakan untuk apa, mereka sangat percaya dengan kita jadi selama hampir 6 tahun ini tidak ada ya mba”.¹⁰⁷

Selain itu, penulis juga mewawancara Kepala Dusun Krajan

II yang mengatakan bahwa: “Mungkin seingat saya sudah dilakukan dulu namun ini ya terkadang hal-hal seperti itu untuk para donatur tidak penting, sebab yang terpenting adalah tetap berjalan organisasi tersebut tapi ya saya rasa itu hanya kemungkinan ya”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita mengatakan pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan namun dari donatur tidak pernah bertanya terkait hal tersebut.

¹⁰⁵ Makhroji, diwawancara oleh Penulis, 16 April 2025

¹⁰⁶ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

¹⁰⁷ Bipit, diwawancara oleh Penuli, Jember, 16 April 2025

¹⁰⁸ Rudi, diwawancar oleh Penulis, Jember, 16 April 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah dilaksanakan namun tidak maksimal karena dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk menjaga integritas organisasi. Hal ini dibuktikan dengan ternyata masih ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara terbuka. Dibawah ini beberapa temuan mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, transparansi adalah dimana perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.¹⁰⁹ Transparansi juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi,

¹⁰⁹ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 5

dan kebijakan yang didasarkan pada preferensi masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi akan selalu berkembang seiring dengan perubahan global dan membutuhkan konsep dan kerangka kerja yang baru.

Sedangkan menurut Dadang Suwanda Transparansi yakni suatu informasi yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹¹⁰

Pada saat melakukan observasi dan wawancara bersama Makhroji, Dewi, Bipit, Rudi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita, prinsip transparansi telah dilakukan dengan beberapa kebijakan dari organisasi. Dalam kebijakan nya yang telah ditentukan oleh organisasi. Hal yang dilakukan oleh Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita untuk melakukan transparansi seperti melakukan informasi terbuka melalui grup whatsapp milik organisasi, memfasilitasi

¹¹⁰ Dadang Suwanda dkk., Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik, 44

keterbukaan dengan mengadakan rapat yang diikuti oleh rukun tetangga, rukun warga serta kepala dusun.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah transparan dalam pengelolaan dana organisasi karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yaitu telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan adanya laporan pertanggungjawaban melalui rapat yang diadakan bersama para tokoh masyarakat Desa Keting. Meskipun informasi yang disampaikan tidak sempurna sebab ada hal yang tidak disampaikan ke publik demi keutuhan integritas organisasi. Dalam hal ini diwajarkan oleh mereka bahwa memang ada beberapa informasi yang tidak diperbolehkan untuk dipaparkan secara terbuka, selain karena mempertahankan keutuhan integritas juga untuk menghindari kejadian yang membahayakan keberadaan organisasi.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Menurut Undang Ruslan Wahyudin pengertian akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. akuntabilitas bisa dalam bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah

dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.¹¹¹

Sedangkan menurut Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini, peran kewajiban atau pertanggungjawaban harus bisa menggambarkan suatu kinerja perusahaan dalam mendapatkan tindakan seseorang yang mencakup kumpulan organisasi dari tiap-tiap pihak yang memiliki hak dan wewenang dalam mendapatkan hasil serta tanggung jawab tersebut.¹¹² Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu organisasi.

Sedangkan menurut Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias akuntabilitas merupakan sebuah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diberikan untuk melakukan pertanggungjawaban kemajuan atau kegagalan dan mengungkapkanrealisasi otoritas yang diperoleh sebagaimana dengan tujuan organisasi. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana organisasi diukur dari kepatuhan dan ketaatan

¹¹¹ Undang Ruslan Wahyudin., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efesiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas*, 10-11,

¹¹² Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, *Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa*, 119

terhadap asas independensi, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin.¹¹³

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian lapangan.

Sebagaimana hasil dari observasi dan wawancara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah melakukan pertanggung jawaban kegiatan maupun keuangan sewajarnya. Pelaporan nya yang digunakan hanya berbentuk pembukuan pada semestinya. Menurut mereka dalam pembuatan laporan pembukuan yang sesuai tidak sempurna sebab minim nya ilmu yang mereka punyai serta keterbatasan dari pendidikan. Hal ini membuat disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan sebuah pelaporan petanggung jawaban yang digunakan sebuah organisasi nirlaba.

3. Penerapan Prinsip Independensi Dalam Pengelolaan Dana Pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* pengertian Independensi atau kemandirian adalah sikap perusahaan atau organisasi yang harus secara independen sehingga masing-masing organ organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinvertensi oleh pihak lain.

¹¹⁴ Organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau

¹¹³ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya,” 3

¹¹⁴ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 7-9

tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Sedangkan menurut Yusak Yaris Winarta Independen (*independency*), adalah bentuk peningkatan kinerja pengelolaan organisasi yang diimplementasikan melalui tidak adanya tekanan dan desakan dari pihak lain serta adanya aturan yang mendasar terkait keputusan objektif yang memedulikan hak dan tugas pekerja. Sehingga independen dibutuhkan sebagai wujud dari sikap profesional agar organisasi tidak mendapatkan pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan organisasi. Pada umumnya dalam organisasi nerapkan bagaimana langkah-langkah, kebijakan, dan sistem yang dapat mencegah tindakan mendominasi dan mencegah konflik kepentingan.¹¹⁵

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif, tidak terikat oleh tekanan, pengaruh, atau kepentingan pihak manapun. Dalam hal ini organisasi harus tetap berusaha tidak tunduk pada intervensi yang bertentangan dengan visi-misi organisasi. Yang mana hal ini sesuai dengan temuan penelitian dilapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Makhroji, Dewi, Bipit, dan Rudi, Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita akan

¹¹⁵ Yusak Yaris Winarta, , “Analisis Penerapan Good Governance Pada Organisasi Keagamaan Gkj Wedi,”13-14

mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi organisasi. Hal ini terbukti terdapat beberapa pejabat publik yang ingin mencalonkan diri untuk meminta dukungan, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh pengurus organisasi. Penyampain dari ketua organisasi pun sangatlah mencerminta bahwa organisasi memagang teguh kemandirian sebab beberapa kali mitra dengan polsek dan mitra dengan pemerintah desa. Namun untuk kegiatan murni Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tidak mau di otak-atik dan kita memegang teguh sikap kemandirian kita sebagai organisasi nirlaba.

Pendapat tersebut akan memungkinkan mempengaruhi kreabilitas organisasi tetap berjalan. Dalam hal ini independensi telah diupayakan secara konsisten oleh organisasi dalam berbagai aspek manajerial dan program. Independensi tercermin dari sikap organisasi yang tidak bergantung secara mutlak pada pendanaan luar, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah internal. Prinsip independen dapat diterapkan dengan cara pengurus organisasi diberikan kewenangan yang mandiri untuk dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat membawa organisasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan fungsinya, melalui pembentukan struktur organisasi, regulasi tentang hubungan kekeluargaan yang dekat antar anggota organisasi.

Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi

Sosial Peduli Sesama Kita telah menunjukkan bahwa organisasi telah mengupayakan sebagian prinsip *good governance*, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek laporan pertanggung jawaban akuntabilitas, perlu penguatan dalam aspek pelaporan pertanggungjawaban yang lebih terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan, kepercayaan donatur, dan kesesuaian dengan prinsip *Good Governance*. Dalam penerapan prinsip nya pun masih beberapa yang dipakai hanya 3 prinsip yang sesuai dengan keadaan yang ada di organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Suci Meinarti, Sahade, Masnawaty S yang berjudul Analisis Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar dan hasil penelitian menunjukkan belum tersedia nya pelaporan keuangan akuntabel yang menjadikan belum terpenuhi nya aspek *Good Governance*.

4. Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Dana Pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Selain transparansi, akuntabilitas, dan independensi juga sudah diterapkan sebuah pertanggungjawaban secara ke islaman yaitu perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqashid syariah* dapat diterapkan dalam pengelolaan dana organisasi untuk memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan nilai nilai syariah dan mencapai kesejahteraan umat.

Maqashid syariah adalah tujuan dari hukum Islam yang tertuang dalam serangkaian aturan-aturan.

Menurut Fahmi R dan Firdaus *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditemui dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits. Hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah, berkesimpulan bahwa hukum-hukum tersebut disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tingkat kemaslahatan manusia tersebut terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Untuk kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat ada 5 pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.¹¹⁶

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Safriadi mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap

¹¹⁶ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

ketentuan hukum. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.¹¹⁷

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan dalam mencapai kemaslahatan manusia maka dari itu maqashid syariah dapat diterapkan dengan Memastikan kegiatan pengelolaan dana desa mencapai tujuan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah, dan melibatkan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip agama. Lima (5) nilai *maqashid syariah*, yaitu:

a. *Hifdzun al-din* (perlindungan terhadap agama)

Komponen yang menjadi pilar utama dan harus diutamakan menurut Achmad Al-Mursi Husain Jauhar yaitu *hifdzun al-din* (perlindungan terhadap agama). Menurut Achmad Al-Mursi Husain Jauhar Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam¹¹⁸

Dalam konteks ini menjaga, melindungi, dan menegakkan ajaran agama Islam agar tetap terjaga kemurniannya dalam keyakinan, ibadah, akhlak, serta praktik sosial dipercaya sehingga

¹¹⁷ Safriadi, Maqashid Al-Syariah & Masalahah, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101

¹¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 1

tidak terjadi seperti fitnah dan penghianatann dalam ajaran agama. Dari hasil wawancara bersama Makhroji, Dewi, Bipit, Rudi mengadakan rapat rutin yang diadakan oleh organisasi untuk menghindari terjadinya fitnah yang merusak ajaran agama dan mengadakan kegiatan perayaan HBI di Desa Keting. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana desa di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan dalam menjaga ataupun memelihara agama yang anut oleh masyarakat desa.

b. *Hifdzun al-nafs* (pemeliharaan jiwa).

Komponen kedua yaitu *hifdzun al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Pada konteks ini berhubungan dengan kesejahteraan jiwa (masyarakat Desa Keting dan antar sesama) Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang paling utama yang diprhatikan Islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan

tidak boleh dimusnahkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah SWT.¹¹⁹ Hal ini sesuai dengan temuan penelitian lapangan.

Yang mana hasil wawancara bersama Makhroji, Dewi, Bipit, dan Rudi kesejahteraan yang dilakukan oleh Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memberikan pelayan seperti pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat Desa Keting untuk membantu meringankan terjadi sesuatu hal yang mengancam jiwa masyarakat Desa Keting. Dalam hal ini Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah menerapkan nilai menjaga jiwa yang mana dalam pelaksanaannya pihak masyarakat Desa Keting sendiri.

c. *Hifdzun al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Pada komponen ketiga yaitu *hifdzun al-aql* (perlindungan terhadap akal), dalam konteks ini berhubungan dengan keterbukaan informasi dana untuk keperluan pengembangan intelektual dan pendidikan. Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹²⁰

¹¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 21-23

¹²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 91-92

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat temuan dilapangan bahwasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang mengatakan bahwa selama ini untuk mengembangkan pendidikan ke masyarakat lewat *Little Star* dengan diadakan nya semacam les gitu biar anak-anak kecil di Desa Keting juga memiliki ilmu tambahan, ya untuk dana nya masih tetap sama dari beberapa donatur terus ada dari wali murid atau bisa dari masing-masing anggota. Program ini digunakan untuk para anak-anak supaya melatih pembelajaran komunikasi berbahasa inggris serta bermain dengan menggunakan bahasa inggris. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah melaksanakan nilai menjaga akal dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik dan membekali Pendidikan untuk masa yang akan datang.

d. *Hifdzun al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan).

Berikutnya yaitu komponen keempat yaitu *hifdzun al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan

dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.¹²¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang mengatakan memang ada kendala dalam perekrutan untuk generasi selanjutnya, namun untuk menjaga moralitas kita menerapkan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan sosial yang kita laksanakan, seperti merenovasi makam, dan kita sempat memberikan wawasan kepada anak-anak kecil di *Little Star* untuk menumbuhkan jiwa sosial dengan mengajak mereka dalam kegiatan kunjungan ke panti jompo. Tidak adanya generasi selanjutnya disebabkan oleh minimnya para anak muda yang memiliki jiwa sosial dan juga berkurangnya para anak muda di Desa Keting. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita telah melakukan nilai memelihara keturunan dengan mengikut sertakan para anak-anak untuk menumbuhkan jiwa sosial.

¹²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 131-133

e. *Hifdzun al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Pada konteks kelima yaitu *hifdzun al-mal* (perlindungan terhadap harta benda). Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah SWT dan masyarakat tempat dia hidup.¹²² Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat temuan dilapangan bahwasannya.

Hasil wawancara dengan bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita yang mengatakan beberapa kali sudah dilakukan karena memang donatur kita sangatlah percaya kepada organisasi jadi mereka tidak pernah bertanya, kita juga sangatlah menjaga kepercayaan dari donatur supaya tetap terjaga eksistensi sebagai organisasi sosial yang mana kita juga memiliki program rutin.

¹²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), 167-169

Tabel 4.2

Prinsip *Good Governance* ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Pengelolaan Dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Implementasi
1	<i>Hifdzun Al-Din</i>	Mengadakan kegiatan HBI
		Mengadakan rapat
2	<i>Hifdzun Al-Nafs</i>	Memberikan pinjaman dana tanpa bunga
3	<i>Hifdzun Al-Aql</i>	Mengadakan program <i>Little Star</i>
4	<i>Hifdzun Al-Nasl</i>	Mengikutsertakan anak-anak untuk menumbuhkan jiwa sosial
5	<i>Hifdzun Al-Mal</i>	Ketidak sempurnaan pertanggungjawaban

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita terlihat bahwa telah menerapkan lima *maqashid syariah* dengan baik namun ada satu yang tidak diterapkan yakni dalam *hifdzun al-mal*. Hal ini menyebabkan kurang adanya pelaporan pertanggung jawaban terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip *Good Governance* pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita perspektif *maqashid syariah*, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip transparansi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah transparan dalam pengelolaan dana organisasi karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yaitu telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan adanya laporan pertanggungjawaban melalui rapat yang diadakan bersama para tokoh masyarakat Desa Keting. Meskipun informasi yang disampaikan tidak sempurna sebab ada hal yang tidak disampaikan ke publik demi keutuhan integritas organisasi. Dalam hal ini diwajibkan oleh mereka bahwa memang ada beberapa informasi yang tidak diperbolehkan untuk dipaparkan secara terbuka, selain karena mempertahankan keutuhan integritas juga untuk menghindari kejadian yang membahayakan keberadaan organisasi.
2. Penerapan prinsip transparansi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah melakukan pertanggung jawaban kegiatan maupun keuangan sewajarnya. Pelaporannya yang digunakan hanya berbentuk pembukuan pada semestinya. Menurut mereka dalam pembuatan

laporan pembukuan yang sesuai tidak sempurna sebab minim nya ilmu yang mereka punyai serta keterbatasan dari pendidikan.

3. Penerapan prinsip transparansi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita sudah melaksanakan kemandirian dengan benar, mereka telah melakukan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh organisasi. Seperti hal nya tidak memihak atau tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan program organisasi.
4. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita terlihat bahwa telah menerapkan lima *maqashid syariah* dengan baik namun ada satu yang tidak diterapkan yakni dalam *hifdzun al-mal*. Hal ini menyebabkan kurang adanya pelaporan pertanggung jawaban terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis di atas, berikut adalah saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk masa depan:

1. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita diharapkan dapat membuat laporan transparansi yang sistematis sesuai dengan pelaporan yang di khususkan untuk organisasi nirlaba seperti membuatkan format dokumen standar yang dicetak ataupun digital bisa juga semacam SOP pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Agar laporan pertanggung jawaban akurat dan efektif sebaiknya di dalam pencatatan baiknya hanya bendahara saja yang mencatat

sedangkan untuk yang lain nya hanya diperbolehkan mengakses dan melihat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat dan juga tentunya kepada para donatur–donatur.

3. Pastikan dalam penerapan prinsip independensi tetap profesioanal, amanah sesuai dengan prinsip Good Governance dan juga sejalan dengan peraturan yang telah organisasi pegang. . Prinsip independensi perlu dijaga agar Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita tetap objektif, bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok, serta konsisten dalam menjalankan misi sosial dan keagamaannya.
4. Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita memerlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada profesionalisme, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Nilai-nilai *maqashid syariah* telah diterapkan keseluruhan, ada baiknya jika semua diterapkan termasuk dalam menjaga harta pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita supaya tetap terjaga nya harta yang terdapat pada organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zuhri Ramadhan, Diah Hari,” Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba”, *Public Management and Accounting Review*, Volume 1 No 1 January 2020, <https://doi.org/10.61656/pmar.v1i1.18>
- Bambang Suryono, Organisasi Nirlaba: Karakteristik Dan Pelaporan Keuangan Organisasi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, November 2016, [10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1883](https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1883)
- Cicilia Citra Maradesa, James D. D Massie, “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Organisasi Nirlaba Di Unit Transfusi Darah” *Jurnal EMBA*, Vol. 7 No. 4 Oktober 2019, <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26241>
- Dadang Suwanda dkk., Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 44, <http://eprints.ipdn.ac.id/5905/>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023) 34-35, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091>
- Eko Sudarmono dkk., *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 7-8, <https://martonomily.com/wp-content/uploads/2024/07/FullBook-Good-Corporate-Governance-web.pdf>
- Fahmi R dan Firdaus, “Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang *Maqashid Al-Syariah*.” *Jurnal iain manado* 3, no. 2 (2023), <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>
- Farryl Febian Aroran, Mutya Paramita Pratita, Marjam Desma Rahadhini, “ The Influence of Good Corporate Governance (GCG) Implementation on the Youth Information and Counseling Centers (PIK-Remaja) Effectiveness in Surakarta” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* Vol. 7 No. 1, Mei 2024, <https://www.ejournal.aibpmjournals.com/index.php/JICP>
- Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, Muh Hamdi Zain., *Birokrasi Dan Publik Governance* (Yogyakarta: CV Istana Agenci, 2024), [https://digilib.uinkhas.ac.id/32145/1/BIROKRASI%20DAN%20PUBLIK%20GOVERNANCE ISBN OK.%20-%20EBOOK.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/32145/1/BIROKRASI%20DAN%20PUBLIK%20GOVERNANCE%20ISBN%20-%20EBOOK.pdf)

Gamal Thone, “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam”, Serupa.id, Februari 2021, Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Mcam – serupa.id

Hamdani. Konsep *Corporate Governance Syariah*. Mitra Wacana Media, 2019

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, CV. Perpustakaan Ilmu Grup, Yogyakarta, April 2020 <https://www.perpusnas.go.id/>

Hendrayuda Suwarno, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Pondok Pesantren, *Qualitative Research of Bussines and Social Sciences* Vol. 1, No. 2, 2024 (Hal.87-100), <https://doi.org/10.31316/qrobss.v1i2.6687>

Hilda Salman Said, Chusnul Khotimah, Dekri Ardiansyah, Hanifah Khadrinur, Marsheli Indira Putri, “Teori Agensi : Teori Agensi dalam Perspektif Akuntansi Syariah” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 25 Desember 2022, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

Ibn ManzuuR dalam Muhammad Iqbal, *good governance* perspektif *maqasid maaqashid asy – syariah* kontenporer, *Journal metro univ*, Volume 23 no 1, Agustus 2018, <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/1195>

Ihsanul Windasari, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam, *Jurnal akuntansi dan bisnis syariah*, Vol. 1 No. 1 (2024):Edisi 1, <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>

Islahuddin, Muhammad *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh), *Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020,

Kartika, Citrawati, Fitri. Hanafi, Imam. Hermawan, *Good Environmental Governance*, Universitas Brawijaya Press, 2012, <http://www.ubpress.ub.ac.id>

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*,2006),https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

Lailatul Qomariyah, Erna Sulistiyowati, “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 5 No. 1 Januari 2022, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i1.834>

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003), 3-4, https://pakajen.go.id/main/images/New_Web/4.Kesekretariatan/4.18.Pedoman_Pengelolaan_Kesekretariatan/D.PTIP/C.Pelaporan/11.SK_KaLAN_239-2003_SAKIP.pdf
- Marlia Asmarani, Rohmawati Kusumaningtias,” Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al- Falah Surabaya”, Akunesa: *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol 8, No 1, September 2019, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar dan Miah Said, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sulawesi Selatan: CV Berkah Utami, 2021), 16-17, https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.%20BUKU_AKUNTABILITAS%20DAN%20TRANSPARANSI%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN....pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Muzlifah dalam Fredy Dwi Helyanto, “ Analisis Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah Dalam Mencapai *Maqashid Syariah* Pada Bank Umum di Indonesia”, *El Muhasaba : Jurnal Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020 <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7324>
- Nadia Azalia Putri dkk., “ *Do Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, and Good Corporate Governance Affect Indonesia's Mining Companies Value?*,” *Journal Accounting and Finance Review (AFR)* 2, no. 2 (April 2017): 58, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3000162
- Nur Alifah Fajariyah & Khusnul Khotimah, “*Sharia Risk, The Indicator of Sharia Governance on Islamic Banks*,” *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 1, no. 1 (Juni 2018): 70-71, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/34>
- Nur Ika Mauliyah, Erna Puspitasari, dan Anam Miftakhul Huda, “Mewujudkan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Penelitian & Pemikiran Ekonomi* 7, no.1 (Desember, 20):18, <https://core.ac.uk/download/pdf/235209036.pdf>
- Nurohimah, Aurya Dewitri Angel Siboro, Ratih Kusumastuti, Dampak Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Laporan Keuangan Masjid (Analisi Studi Kasus Di Kota Jambi), *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol.2/1No.1 Januari 2024, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.489>

- Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance di Jember,” *Journal of Social and Islamic Culture* 22, no. 2 (April 2014):210-212, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>
- Penyusun.Tim, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , (Jember: Uin Khas Jember, 2021)
- Pradana, R., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, penerapan good corporate governance, dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada nilai perusahaan. *E-JurnalAkuntansi*, 28(3), 1920. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p18>
- Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa, *E-JRA* Vol. 10, No. 04(2021):119, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10563/8353>
- Romi, M. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2), 49–59. <http://dx.doi.org/10.31258/jab.3.1.%25p>
- Safriadi, Maqashid Al-Syariah & Masalahah, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101-102, <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalahah.pdf>
- Suci Meinarti, Sahade, Masnawaty S, “Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar” *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* Volume 2, No. 4 Desember 2024 pp. 338-348, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.135>
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta 2012
- Sulastri, Ichwani Siti Utami, “Implementasi *Good Governance* Pada Organisasi Mahasiswa” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 September 2020 , <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p87-96>
- Suryana, Syafrizal Ikram, Implementasi *Good Waqf Governance* Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia, *Ekuilnomi : Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 6 No 2 Mei 2024, <https://doi.org/10.36985/2r3a5456>
- Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung:CV. Media Sains Indonesia, 2020), 38-70, <https://repositori.uin->

alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah-.pdf

Team Amartha Blog, “ Apa itu Organisasi Nirlaba atau Lembaga Non Profit” , 5 Juli 2022, <https://amartha.com/blog/work-smart/apa-itu-organisasi-nirlaba-atau-lembaga-non-profit/>

Wildan Khisbullah Suhma dkk.,” Change management towards good university governance in Indonesia: study at Islamic religious universities based on BLU mandate,” *Cogent Social Sciences* 10, no.1 (Maret 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2333081>

Yusak Kharis Windarta, “Analisis Penerapan Good Governance Pada Organisasi Keagamaan Gkj Wedi” *Journal Economic and Business*, Juli 2023, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30853>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Independensi 4. <i>Maqashid Syariah</i>	1. <i>Good Governance</i> 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Independensi 5. <i>Maqashid Syariah</i>	1. Ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita 2. Bendahara Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita 3. Anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita 4. Kepala Dusun Krajan II 5. Jurnal 6. Website 7. Buku	1. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif 2. Teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi 3. Keabsahan data menggunakan: 1) Triangulasi teknik 2) Triangulasi sumber	1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 3. Bagaimana penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita? 4. Bagaimana implementasi nilai-nilai <i>maqashid syariah</i> dalam pengelolaan dana pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : Fitri Anggraeni
 Nim : 214105030035
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
 Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)” adalah benar-benar karya asli tulisan saya sendiri kecuali ketupin-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian saya membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Mei 2025
 Yang Menyatakan


Fitri Anggraeni
 Nim: 214105030035



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
2. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
3. Bagaimana implementasi prinsip independensi pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
4. Bagaimana implementasi nilai *hifdzun ad-din* (agama) pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
5. Bagaimana implementasi nilai *hifdzun al-nafs* (jiwa) pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
6. Bagaimana implementasi nilai *al-aql* (akal) pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
7. Bagaimana implementasi nilai *hifdzun al-nasl* (keturunan) pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?
8. Bagaimana implementasi nilai *hifdzun al-mal* (harta) pada Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <https://febl.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1344/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 25 November 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

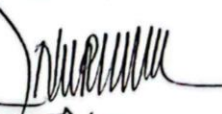
Ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita
 Krajan II, Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember
 Jawa Timur 68168

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fitri Anggraeni
 NIM : 214105030035
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu





FORUM ORGANISASI SOSIAL PEDULI SESAMA KITA

Krajan II, Keting, Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
Telp +6281216708012 Kode pos 68168

SURAT KETERANGAN

Nomor : 121/20 /PSK/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahkroji

Jabatan : Ketua Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswa dibawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Fitri Anggraeni	214105030035	Akuntansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita pada tanggal 14 Desember 2024 s/d 16 April 2025.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 April 2025

KETUA FORUM ORGANISASI SOSIAL
PEDULI SESAMA KITA
J E M B E



MAKHROJI

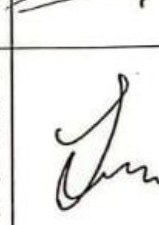
**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PADA FORUM ORGANISASI
SOSIAL PEDULI SESAMA KITA**

Nama : Fitri Anggraeni

Nim : 214105030035

Judul : Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam
Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Organisasi Nirlaba (Studi
Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)

Lokasi : Krajan II, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	7 September 2024	Pra penelitian untuk memastikan kondisi yang ada di lapangan	
2	12 September 2024	Observasi mengenai gambaran objek penelitian di anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita	
3	14 Desember 2024	Menyerahkan surat izin penelitian dan silaturahmi di Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita	
4	12 Januari 2025	Wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Serta Kepala Dusun Krajan II dan meminta dokumensi untuk melengkapi data penelitian	
5	14 Maret 2025	Wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Serta Kepala Dusun Krajan II dan meminta dokumensi untuk melengkapi data penelitian	

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
6	16 April 2025	Wawancara dengan ketua, bendahara, anggota Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita. Serta Kepala Dusun Krajan II dan meminta dokumentasi untuk melengkapi data penelitian	



Jember, 08 Mei 2025

Ketua Forum Organisasi
Sosial Peduli Sesama Kita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara bersama ketua
Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita



Wawancara bersama Kepala Dusun Krajan II



Wawancara bersama ketua dan bendahara
Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita



Wawancara bersama salah satu anggota
Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita

Kegiatan Bagi Takjil 19-23 Maret 2025

Saldo awal	Rp. 4.000.000,-
Donasi Masuk	Rp. 250.000,-
	Rp. 60.000
	Rp. 100.000
TOTAL	Rp. 4.410.000

Pengeluaran

19-22 Maret 2025 -

Beli Roti susu 160 pack @ Rp. 4500
 $Rp. 4500 \times 160 = Rp. 720.000$

Beli Snack 80 Kentang @ Rp. 9.000
 $Rp. 9000 \times 80 = Rp. 720.000$

Beli Wafer Nabati @ Rp. 18.000 $\times$ 80
 $Rp. 1.440.000$

Beli Pisang (Pisang coklat) ke Mbak Ju
 untuk Bagi takjil Rp. 250.000,-
 (50 Kotak) per Kotak Rp. 5.000,-

Beli ES Campur + snack ke Mbak In @ Rp. 5000,-
 Total Rp. 250.000

TOTAL Pengeluaran	Rp. 3.380.000,-
Untuk Lain? Sft Kresak, Bensin, Sound system	Rp. 500.000,-
Sisa Uang	Rp. 4.410.000
	Rp. 3.380.000
	Rp. 500.000
	Rp. 530.000,-

Gambar : Laporan Keuangan Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Anggraeni
 NIM : 214105030035
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Forum Organisasi Sosial Peduli Sesama Kita)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 19 Mei 2025

Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.El
NIP. 197709142005012004



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Fitri Anggraeni

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Januari 2002

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lumba-Lumba No. 59 Mangli,
Kec. Kaliwates, Kab. Jember Jawa Timur

2. Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita : 2007-2009

SDN Sukorambi 01 : 2009-2015

SMP Islam Al-Hidayah : 2015-2018

SMK 2 Pancasila Jember : 2018-2021